

# Dinamika

forum komunikasi dunia usaha

-- **Modal Swasta Asing**

-- **Kelemahan Management**

-- **Indonesia dan Kualitas Modal**

-- **Persepsi Pemenuhan Modal Swasta**

-- **Asing di Indonesia**

2

- 72

kamar dagang & industri jawa-barat  
( west java chamber of commerce & industry )

# Dinamika

forum komunikasi dunia usaha

- **Modal Swasta Asing**
- **Kelemahan Management**
- **Indonesia dan Kesulitan Moneter Internasional**
- **Preferensi MEE**
- **Perdagangan Indonesia - Australia**
- **LPPM**

**2**

**1 - 12 - 72**

**kamar dagang & industri jawa-barat**  
( west java chamber of commerce & industry )

APABILA PERUSAHAAN TUAN BERGERAK DALAM BIDANG RETAILING, ATAU USAHA-USAHA LAIN YANG KONSUMEN- NYA ADALAH MASYARAKAT LUAS,

KAMI **TIDAK** MENGANJURKAN TUAN MEMASANG IKLAN DI SINI, SEBAB TUJUAN TUAN DALAM MEMASANG IKLAN TIDAK AKAN TERPENUHI.

MUNGKIN SURATKABAR AKAN LEBIH SESUAI BAGI KEPEN- TINGAN TUAN.



SEBALIKNYA, KALAU TUAN ADALAH MANUFACTURER, SOLE DISTRIBUTOR, SOLE REPRESENTATIVE, ATAU PE- NGUSAHA DALAM BIDANG-BIDANG LAIN YANG MEM- BUTUHKAN PERANTARAAN SEBELUM SAMPAI KEPADA MASYARAKAT LUAS,

MAKA **DINAMIKA** ADALAH SATU DI ANTARA MEDIA KO- MUNIKASI YANG COCOK UNTUK MENAWARKAN BA- RANG/JASA YANG DAPAT TUAN BERIKAN



KARENA LAPISAN PEMBACA YANG MENJADI SASARAN **DINAMIKA** ADALAH DUNIA USAHA, PEJABAT-PEJABAT PE- MERINTAH YANG LANGSUNG MENANGANI SOAL-SOAL PER- EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.

SINGKATNYA, PARA DECISION-MAKERS PADA UMUMNYA.

# 2

# Dinamika

forum komunikasi dunia usaha

Desember 1972

## ARTIKEL

Penanaman Modal Swasta Asing di Indonesia <b>SUDJATMOKO</b>	4
Beberapa Titik Kelemahan Management di Indonesia <b>B. N. MARBUN</b>	10
Peranan Indonesia dalam mengatasi Kesulitan Moneter Internasional <b>R. E. A. MAMOER</b>	14
Proses Indonesianisasi Perusahaan Joint-Ventures <b>DEDDI ANGGADIREDJA</b>	20
Kebijaksanaan Preferensi MEE dalam rangka UNCTAD <b>KARL-HEINZ GROSZ</b>	27
Tourism Boom <b>OEJENG SOEWARGANA</b>	34

## RUBRIK TETAP

Kesempatan Dagang	9
Penemuan Baru	18
Lembaga-lembaga	24
Ekonomi Singkat	32

## FEATURE

Bantuan IGGI 1972	13
Penanaman Modal Jepang di Luar Negeri	13
Konsulat Indonesia di Melbourne	19
Brussels Tariff Nomenclature	35
Membicarakan Ekonomi Indonesia di Canberra	37
Perusahaan Jepang cari Joint-Venture	38
Perdagangan Indonesia — Australia	40
Assuransi Kredit Ekspor Jerman	43

KADIN JABAR menerbitkan majalah ini dengan maksud menciptakan suatu forum komunikasi antar-pengusaha, antara pengusaha dengan pemerintah, dan antara pengusaha dengan pihak perguruan tinggi serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Di ikhtiarkan untuk menyajikan artikel2 dengan perbandingan yang sepadan antara ilmiah/teoritis dengan yang bersifat praktis dan juga berita-berita atau informasi yang kiranya bermanfaat bagi dunia usaha.

Sesuai dengan bidang kerjanya, tilik-berat perhatian ditujukan kepada wilayah Jawa Barat.

**H A R G A :**

- \* Eceran : Rp. 150,—
- \* Langganan  
per ½ tahun : Rp. 450,—  
termasuk ongkos kirim.—

**ARTIKEL :**

Redaksi menerima artikel-artikel dari luar yang khusus ditulis untuk majalah ini, mengenai perdagangan dan perindustrian, serta masalah-masalah sosial/budaya yang mempengaruhi hal-hal tersebut.

Untuk artikel yang dimuat disediakan honorarium yang layak.

Hendaknya naskah diketik rangkap dua dengan spasi dobel, dan tidak melebihi 10 halaman folio.

Artikel-artikel didalam majalah ini tidak perlu mencerminkan kebijaksanaan dan pandangan KADIN JABAR.

## DINAMIKA

terbit 2 bulan sekali.

diterbitkan oleh :  
**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI  
JAWA BARAT.**

**N. KIROYAN**

— redaktur

**ZAMZAM ACHMAD**

— penata usaha

Jalan : Suniaraja timur 1A

— Telp. : 50301 — Bandung.

Isi diluar tanggung jawab Perc. "BANDUNG" P.T.

# DARI REDAKSI

Hal-hwal modal asing memang menarik. Bukan saja bagi sipemilik yang menuai buah dari bibit yang ia tanamkan, akan tetapi juga menarik dari kenyataan bahwa ia masih juga menjadi pokok permasalahan yang cukup hangat hingga kini.

Di negara kita, dua pandangan dasar nampaknya menguasai lapangan, masing-masing dengan aneka variasinya. Yang satu lebih cenderung menilai modal asing sebagai suatu "necessary evil" tidak terlalu disukai, namun akan mempunyai akibat kurang nyamannya bumi Indonesia untuk dihuni apabila kita mengabaikannya. Sebab, pembangunan dikaitkan kepada pengertian peningkatan investasi dan konsumsi, sedangkan untuk meraih keduanya sekaligus kita dirundung kekurangan modal sendiri, yang pada gilirannya tidak bisa diciptakan dengan dekrit atau instruksi maupun pernyataan tekad.

Pandangan satunya lagi dengan penuh sukacita menyongsong kedatangan modal asing sebagai karunia yang tiba tepat pada waktunya untuk melepaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kemiskinan dan kemelaratan yang mencekam selama ini - yaitu sama halnya dengan di atas melalui peningkatan investasi dan konsumsi dengan memakai modal orang lain dahulu - juga untuk menajari bangsa Indonesia cara-cara dan sikap-sikap baru yang disebut orang, modern.

Jadi, pada hakekatnya kedua pandangan ini tidak mengandung pertentangan. Dan memang, seperti diutarakan oleh Dr. Sri Edi Swasono dari BAPPENAS di dalam Harian KOMPAS tanggal 15 Mei 1971, pertanyaan mengenai perlu tidaknya modal asing sudah terjawab dengan pengesahan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing. Hal ini ditegaskan kembali oleh Presiden Suharto pada peresmian PRESIDENT HOTEL di Jakarta baru-baru ini.

Soal modal asing dimana-mana memang menyediakan bahan pertikaian. Ada yang menganggapnya obat dan ada pula yang menganggapnya penyakit. Bukan saja negara-negara berkembang diliputi pertentangan pendapat perihal modal asing ini. Tanggapan luas terhadap karangan intelek, tuil Perancis, Jean-Jacques Servan-Schreiber, sekitar tahun 1967 dengan judul "La Défi Americain" (Tantangan Amerika) menentang kegunaan serta kerisauan orang Eropa menyaksikan modal Amerika menancapkan diri di dalam dunia usaha Eropa. (Dan tidak akan mengherankan kalau sebentar lagi terbit buku dengan judul "Tantangan Jepang" atau semacamnya). Contoh yang lebih mutakhir dan dekat kepada kita secara geografis adalah pengalaman Australia. Para ahli ekonomi tetangga kita ini dengan kurang gembira harus menelan kenyataan bahwa 80% kendaraan bermotor dan 80% produksi minyak yang dihasilkan negara itu berasal dari perusahaan-perusahaan milik asing, dan dari 10 perusahaan terbesar di negara tersebut, enam berada dibawah kekuasaan asing.

Satu hal menampilkan diri dari kenyataan di atas: tembok-tembok yang membagi dunia ke dalam satuan-satuan politis yang dinamakan negara, tidak cukup tangguh untuk membendung arus modal yang dipancarkan dari kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa. Negara Sosialis seperti Uni Soviet sekalipun menyingkapkan tirai besinya bagi modal kapitalis, dengan dibangunnya pabrik mobil dengan teknologi serta modal dari FIAT.

Kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa di dunia, dalam bentuk multi-national corporations dengan jaringan operasi yang menjejak di atas seluruh bagian dunia, pada waktu ini sedang di-amati oleh para ahli ekonomi dan politik dengan perasaan bimbang dan tidak pasti. Mereka belum tahu sikap apa yang diharapkan dari mereka dalam menghadapi raksasa-raksasa swasta ini yang berproduksi tahunan lebih besar daripada sebagian negara-negara di dunia.

Seperti dikatakan di atas, raksasa2 ekonomi ini telah merupakan kenyataan, kenyataan yang sangat relevant bagi kita yang kini tengah menganggakan pintu bagi masuknya modal asing. Tergantung kepada ikhtiar kita sendiri, apakah negara kita nantinya hanya menjadi salah satu unit kecil saja di antara sekian banyaknya unit-unit lain dalam jaringan operasi raksasa-raksasa itu, sedangkan pada saat yang bersamaan kita sendiri belum mampu mewujudkan diri sebagai satuan ekonomi yang bulat dan utuh.

Dunia usaha kita sendiri harus memperkuat diri supaya nantinya dapat turut berperan dalam menciptakan permintaan, dan bukan sekedar menjadi pelaksana belaka dalam memenuhi permintaan yang lahir dari penciptaan kebutuhan oleh pihak lain. Supaya kita jangan menjadi bangsa yang tingkat kemampuan dan kesanggupannya hanya sampai pemilik warung, toko merancang dan bengkel reparasi saja. Tidak ada salahnya kita telaah lebih seksama kerjasama erat antara pemerintah Jepang dengan para industriawan negara itu, hal mana dalam pandangan Ralf Dahrendorf, "Menteri Luar Negeri" Masyarakat Ekonomi Eropa, menjadi salah satu faktor pendorong tumbuh dan maju pesatnya industri Jepang.

Menyaksikan keadaan dengan bertopang dagu seraya menggerutu tidak akan membawa kita kepada perubahan dan kemajuan.

N. KIROYAN

# Penanaman Modal Swasta Asing di INDONESIA

SUDJATMOKO

---

## PENGANTAR REDAKSI :

Tulisan di bawah aslinya berupa paper yang diajukan Dr. Sudjarmoko sewaktu masih menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat, di hadapan "Symposium on Private Investment Abroad", yang diselenggarakan di International & Comparative Law Center, Dalas, Texas, pada tanggal 19 Juni 1969.

Judul paper "Foreign Private Investment in a developing Nation: an Indonesian Perspective", dan telah diserahkan kepada kami untuk menterjemahkan kemudian menyarikannya. Oleh karena itu, segala kekurangan serta ketidak-tepatan dalam penterjemahan istilah-istilah yang dikemukakan dalam paper tersebut menjadi tanggung-jawab redaksi.

Patut diperhatikan, bahwa tulisan Dr. Sudjarmoko ini dibuat sebelum perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1970. Sekalipun demikian, inti persoalannya masih sangat aktual dan relevant.

---

*Kenyataan bahwa Indonesia telah berbalik haluan dari penolakan modal asing menjadi membuka pintu baginya, menyebabkan Indonesia serta potensi ekonominya memperoleh perhatian khusus, sebagai wilayah baru bagi penanaman modal.*

*Sejak 1958, konflik dengan Belanda telah membawa akibat dikuasainya secara berangsur-angsur kebanyakan perusahaan asing di Indonesia oleh pemerintah waktu itu. Titik berat yang semakin besar kepada perjuangan anti imperialis menyebabkan pemerintah merubah tata perekonomian menjadi "ekonomi terpimpin", yang dijalankan berdasarkan dekrit-dekrit pemerintah, sebagai penunjang politik luar negeri yang radikal, hal mana sebenarnya berada jauh dari jangkauan kekuatan nasional kita. Lambat laun ini membawa Indonesia ke dalam pengkucilan dari pergaulan antar-bangsa, runtuhnya perekonomian secara total, dan pada tahun 1965 robohnya struktur kekuasaan pemerintah.*

*Dari reruntuhan ini telah bangkit suatu pemerintah yang ditandai oleh akal yang sehat, kesadaran akan realitas, dan keterikatan kerada pengutamaan stabilisasi moneter dan perkembangan ekonomi.*

## ORIENTASI POLITIK BARU

Kegigihan yang bersumber kepada impian membangun suatu masyarakat ideal untuk Indonesia sambil memusuhi semua negara kaya dan kuat di dunia, serta nasionalisme ekonomi yang radikal — pada dasarnya suatu topeng penutup xenophobia — dewasa ini telah digeser ke belakang oleh iklim realisme dan pragmatisme ekonomi, keterbukaan terhadap dunia luar, kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, dan pengakuan terhadap peranan penting yang dimainkan oleh sektor usaha swasta dalam memperbaiki perekonomian. Oleh karena itu, peranan yang dapat dan harus dimainkan oleh modal swasta asing dievaluasi secara lebih positif.

Ini tentu saja tidak berarti bahwa sikap-sikap dasar yang melandasi fenomena nasionalisme ekonomi telah lenyap samasekali. Pimpinan negara yang mengendalikan perekonomian saat ini sama terikatnya kepada usaha mencegah dibangunnya kembali dominasi ekonomi asing, dan tidak kurang gigih dalam mempertahankan penguasaan atas sumber-sumber nasional dan perkembangan ekonomi, dan penguasaan kedudukan sejajar bagi Indonesia dalam hubungan ekonominya dengan dunia luar. Kendatipun demikian, kepemimpinan ini disulahi oleh pemahaman realistik hukum-hukum dasar ekonomi serta dinamika perekonomian global modern, dan sadar sepenuhnya akan kebutuhan terhadap bantuan modal swasta serta ketrampilan dan pengalaman asing untuk menggalakan perkembangan.

Bersamaan dengan itu, pemerintah mempunyai kepercayaan lebih besar kepada kemungkinan-kemungkinan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang adakalanya bertentangan dari perkembangan negara dengan gerak usaha swasta asing sebagai lembaga-lembaga pencari laba. Pengembalian perusahaan-perusahaan asing yang diambil alih oleh pemerintah sebelumnya kepada pemilik-pemilik semula dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang disahkan awal tahun 1967 adalah pengejawantahan dari orientasi baru yang pragmatis ini.

Sebelum memperbincangkan secara ringkas segi-segi hukum dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing, terlebih dahulu harus dijawab satu pertanyaan, yakni: bagaimana kestabilan arah yang di

tempuh politik dan perekonomian Indonesia sekarang. Ada beberapa pendekatan dalam menjawab pertanyaan ini. Dapat ditunjukkan teguhnya keterikatan pimpinan sekarang kepada pengutamaan perkembangan ekonomi, atau keberanian politik yang diperlihatkan dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pedih dalam program stabilisasi yang dituntut oleh keadaan. Dapat juga diketengahkan kelemahan ideologis maupun organisatoris kekuatan-kekuatan oposisi dalam negeri.

Akan tetapi, bagi saya faktor terpenting yang menonjol, adalah merekahnya sebuah generasi baru yang muncul setelah kemerdekaan, setelah revolusi, di dalam gelanggang politik. Generasi inilah yang merumuskan, melaksanakan, serta menyangga kebijaksanaan2 yang lahir dari orientasi ekonomi yang baru ini. Oleh karena mereka tidak pernah merasakan sakit dan hinanya penindasan oleh penjajah, pandangan mereka kepada dunia adalah lebih bebas, keyakinan akan dirinya sendiri lebih wajar. Dan hal lain yang sama pentingnya adalah, bahwa generasi ini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta kemungkinan penerapannya terhadap problema-problema yang dihadapi.

Karena realisme ekonomi yang baru ini merupakan suatu bagian pokok dari nilai-nilai baru yang menggerakkan generasi pimpinan yang baru ini, kita dapat memandang arah baru yang ditempuh Indonesia sekarang, baik dalam perkembangan politik dan ekonominya sendiri, maupun dalam hubungannya dengan dunia luar, sebagai suatu gerak pertumbuhan — suatu pertumbuhan dengan arah yang pasti dan tidak mudah goncang.

Akan ditelaah berikut ini beberapa aspek hukum dari Undang-undang PMA.

### PERSOALAN2 POKOK BAGI PENANAM MODAL ASING

Dalam menentukan apakah akan memulai penanaman modal di dalam suatu negara tertentu setelah dengan cermat mempertimbangkan prospek-prospek pengusahaannya, yang menjadi perhatian calon investor pada mula pertamanya adalah keamanan modalnya, dan perlindungan terhadap beraneka ragam risiko, termasuk penyalutan. Segolongan luas persoalan lainnya yang harus ia perhatikan, berhubungan dengan cara pemasukan mo-

dan struktur organisasi dalam pelaksanaan usahanya, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia baginya guna menjalankan usaha dengan efektif. Wilayah perhatiannya yang ketiga bersangkutan-paut dengan pengembalian laba dan dividen ke negara asalnya.

Akan dibahas disini pokok-pokok yang menyangkut ketiga kategori persoalan yang luas ini, akan tetapi pada hemat saya, lebih penting lagi daripada persyaratan-persyaratan hukum berkenaan dengan masalah-masalah ini, adalah apa yang disebut iklim investasi, yakni pandangan pemerintah dan masyarakat terhadap peranan dan hak-hak penanam modal asing di dalam negara tuan rumahnya.

Banyak masalah, terutama di dalam lingkup keamanan investasi, tidak akan timbul apabila iklim investasinya ramah. Jika masalah muncul juga, tidak akan sulit mencapai penyelesaian atau menafsirkan Undang-undang serta peraturan-peraturan dengan cara yang memenuhi kebutuhan2 timbal-balik pihak-pihak yang tersangkut, dengan adanya kemauan baik pada kedua belah pihak.

Walaupun demikian, penting adanya bahwa struktur hukum cukup memadai guna memberi peluang bagi investor asing untuk memasukkan, kemudian menjalankan usahanya, dengan keyakinan bahwa ia tidak akan menjumpai hambatan2 serius, selama ia bertindak dengan cara yang wajar serta mengakui kenyataan bahwa investasi merupakan jalur dua-arah.

#### JAMINAN TERHADAP INVESTASI

Perisai-perisai legal yang disediakan oleh negara tuan rumah tentu saja tidak bergerak secara terpisah dari sarana-sarana pengamanan serupa dari pihak pengekspor modal, dan yang disediakan oleh masyarakat antar-bangsa, berupa Hukum Internasional dan lembaga-lembaga atau persetujuan2 internasional. Sistem internasional bisa juga mencakup perjanjian2 bilateral antara negara tuan rumah dengan negara pengekspor modal.

Dalam menelaah pengamanan2 yang disediakan oleh sistem hukum Indonesia, patut diperhatikan bahwa hukum dagang kita pada dasarnya masih berlandaskan kepada perundang-undangan yang dimasukkan Belanda ke Indonesia untuk urusan-urusan orang Eropa dan yang dikelompokkan ke dalam golongan Eropa secara hukum. Falsafah yang mendasari tata

hukum Indonesia setelah berlalunya masa penjajahan sudah sering diperbincangkan. Misalnya ada pandangan dewasa ini, bahwa mestinya hanya ada satu tata-hukum di Indonesia, yang bertolak dari hukum adat, bukannya dualisme yang merupakan pencerminan masyarakat kita pada jaman penjajahan.

Namun, kenyataannya tetap bahwa perundang-undangan kita mengenai masalah-masalah perdagangan dan keuangan, khususnya sejauh yang menyangkut usaha-usaha asing dan besar pada umumnya, secara jelas bersumber kepada pola Barat, atau setidaknya mengandung unsur Barat yang besar.

Bersumbernya hukum dagang kita kepada pola-pola Barat, tidak diragukan memberikan perasaan tenteram kepada calon-calon investor asing, karena lebih mudah bagi mereka untuk memahami serta merasa tenang menghadapi suatu tata-hukum yang sudah dikenal.

Kembali kepada masalah jaminan atas investasi, tata-hukum kita menyediakan dua alat pengamanan yang dapat dijadikan pegangan bagi investor, yakni perundang-undangan yang mengatur keadaan-keadaan dimana penyitaan dapat dijalankan, dan hak atas peradilan yang bebas.

Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967 tanggal 10 Januari 1967) membentuk kerangka kondisi untuk menerima dan melindungi penanaman modal asing di Indonesia.

Undang-undang ini mencakup selain kedua golongan besar masalah yang sudah disebutkan terlebih dahulu, yaitu fasilitas pemasukan dan pengelolaan, dan pengiriman kembali modal serta keuntungan, juga jaminan perlindungan investasi. Mengenai yang terakhir ini khusus diatur di dalam Bab VIII pasal 21 dan 22. Pasal 21 mengatakan bahwa "Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan2 modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian". Hal ini berarti bahwa harus ada penyelesaian DPR melalui Undang-undang sebelum nasionalisasi bisa dijalankan.

Ada gunanya untuk diketahui bahwa hukum Indonesia juga mengenal sejumlah ketentuan tentang penyitaan secara individu/terpisah, misalnya seperti tercan-

tum dalam Peraturan Penyitaan tahun 1920 (Lembaran Negara 1920 No. 574) yg. penguasaan atas sebidang tanah dengan halnya perundang-undangan Barat lainnya mengenai hal serupa; peraturan ini berlaku misalnya bila pemerintah mengambil penguasaan atas sebidang tanah dengan tujuan membangun jalan raya atau sarana-sarana untuk kepentingan umum lainnya.

Kembali kepada ketentuan-ketentuan pasal 21, perlu diperhatikan bahwa penyitaan secara menyeluruh tidak akan dijalankan kecuali kalau menyangkut kepentingan Negara, jadi tidak dijalankan sebagai tindakan penghukuman.

Pasal 22 Undang-undang tersebut kemudian mengatur serangkaian jaminan, yaitu bahwa pemerintah wajib memberikan ganti rugi, atas dasar persetujuan yg. sesuai dengan azas-azas hukum internasional; atau, bila persetujuan demikian tidak tercapai, akan diadakan arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak. Lebih lanjut ditentukan bahwa badan arbitrase ini terdiri dari 3 orang, yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, sedangkan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal.

Juga dimungkinkan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam penyelesaian antara pemerintah dengan pemilik modal mengenai prosedur-prosedur yang mengatur arbitrase ini, seperti dalam cara memilih arbitrator ketiga seandainya dijumpai jalan buntu. Khususnya, karena Indonesia adalah salah satu penanda-tangan Perjanjian tentang Penyelesaian Pertikaian Soal Investasi antara Negara2 dengan Warga2 dari Negara2 Lain yang disponsori oleh Bank Dunia, maka bisa ditetapkan bahwa arbitrase ini dijalankan menurut ketentuan2 Perjanjian tersebut.

Dalam hal penguasaan atas milik untuk kepentingan umum, maka pertikaian dapat diselesaikan melalui pengadilan2 Indonesia.

Khusus bagi investor Amerika, masih tersedia satu alat pengaman lagi di dalam rangka U.S. Investment Guaranty Program, yang menyediakan jaminan antara lain terhadap perang, penyitaan, revolusi, pemberontakan dan berbagai macam risiko yang bersifat komersial. Pemerintah Indonesia telah mencapai persetujuan dengan pemerintah Amerika Serikat, yang memungkinkan diberlakukannya program ini di Indonesia, dan pemerintah Indonesia juga telah memberikan persetujuan

atas penerapan program ini terhadap beberapa usaha.

#### BEBERAPA FASILITAS YANG DIBERIKAN

Undang-Undang Penanaman Modal Asing telah mengatur perihal pemasukan, pendirian, operasi dan pengelolaan, serta perangsang-perangsang penanaman modal secara khusus, dan memberikan peluang yang lapang bagi investor asing untuk masuk dan menjalankan usahanya tanpa banyak kesulitan.

Undang-Undang baru ini membuka sebagian besar bidang usaha bagi modal asing. Bidang-bidang yang samasekali tertutup bagi modal asing hanyalah bidang-bidang yang vital dalam pertahanan negara (pasal 6 ayat 2).

Bidang-bidang lain yang dibatasi, namun masih bisa dimasuki asalkan investor asing tidak menjalankan penguasaan penuh, diperinci di dalam pasal 6 ayat 1. Tercakup disini bidang-bidang yang menempati kedudukan penting bagi negara, seperti pelabuhan, sarana-sarana umum, tenaga atom dan mass media. Modal asing bisa diikuti-sertakan dengan pengawasan yang ketat, bukan saja dengan penyertaan modal domestik, akan tetapi juga pengawasan pemerintah atas mutu serta harga, atau dengan pengaturan "sale and lease back" dalam hal mana pemilikan usaha yang bersangkutan dilimpahkan kepada pemerintah, yang kemudian menyewakannya kepada investor asing, seperti dijalankan dalam penanaman modal I.T. & T. dalam bidang telekomunikasi.

Dengan landasan Bab IV pasal 9 — 13 UU PMA, investor asing disertai wewenang penuh untuk menetapkan staf management perusahaan yang ia modali, dan diperkenankan mempekerjakan tenaga2 pengelola dan teknis untuk jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga-tenaga Indonesia. Tenaga-tenaga lainnya harus diambil dari kalangan warganegara Indonesia, dan para penanam modal asing diwajibkan menyediakan sarana latihan serta pendidikan untuk mereka, baik dijalankan di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan agar tahap demi tahap pekerja-pekerja asing bisa digantikan oleh orang Indonesia.

Akan tetapi, Undang-Undang ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebegitu jauh belum memperinci ketentuan tentang masalah yang terletak di tengah, antara hak penuh penanam modal asing untuk menunjuk staf management perusahaannya di satu pihak, dan kewajiban mempekerjakan warganegara Indo-

nesia di lain pihak. Dengan pengalaman lebih lanjut, kriteria kuantitatif bisa ditetapkan, baik dalam bentuk peraturan-peraturan yang melingkupi beberapa jenis kegiatan, maupun perjanjian-perjanjian investasi dengan pemerintah.

Tidak usah ditekankan lagi, bahwa Undang-Undang ini ditujukan untuk menarik modal asing ke Indonesia untuk investasi di dalam proyek-proyek yang akan memberikan sumbangan bagi pertumbuhan yang sehat ekonomi Indonesia. Maka dari itu ditawarkan didalamnya beberapa perangsang serta keringanan yang sebanding dengan yang ditawarkan oleh negara-negara berkembang lainnya.

Bagian dari pendekatan untuk menarik proyek-proyek baru ini adalah tawaran insentif terperinci, terdiri atas :

- a. Pembebasan atas pajak perseroan yang bisa sampai selama lima tahun, serta pembebasan atas pajak dividen selama tahun-tahun tersebut.
- b. Wewenang penuh untuk menetapkan staf management dan mengambil tenaga-tenaga teknik serta ahli-ahli asing untuk jabatan-jabatan yang belum mampu untuk diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
- c. Penawaran tanah dengan persyaratan ringan, termasuk hak guna bangunan dan hak guna usaha yang sebelumnya tidak terbuka bagi usaha-usaha asing.
- d. Pembebasan bea masuk dan pajak penjualan impor atas perlengkapan, mesin-mesin, peralatan, serta alat-alat kerja yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan yang bersangkutan.
- e. Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

Tambahan pula, Departemen Keuangan telah memberikan kelonggaran impor bebas bea masuk untuk bahan-bahan baku selama dua tahun pertama usaha dijalankan. Tenaga-tenaga asing juga dibebaskan dari pajak penjualan impor atas bahan makanan sampai sejumlah \$ 100 per bulan.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang ini membuka peluang bagi Pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan memberikan tambahan keuntungan, dengan pengurangan pajak perseroan 0 — 50% untuk suatu jangka waktu tidak lebih lama dari lima tahun setelah awal masa pembebasan pajak, dengan memperkenankan investor asing untuk mengalihkan kerugian yang

dialami pada masa pembebasan pajak untuk diperhitungkan dari laba tahun berikutnya guna kepentingan perhitungan pajak, dan juga dengan mengizinkan perhitungan penyusutan yang dipercepat, serta cara-cara lain yang dipandang sesuai (terutama bagi proyek-proyek besar yang sangat penting bagi perekonomian).

Pasal 19 menentukan bahwa penanaman modal asing diberi hak transfer dalam valuta asli dari modal, atas dasar nilai tukar yang berlaku, untuk :

- a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
- b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia.
- c. Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap.
- d. Ganti-rugi dalam hal nasionalisasi.
- e. Biaya-biaya lain yang akan ditentukan lebih lanjut.

Jadi, transfer keuntungan dijamin berdasarkan Undang-Undang, dengan tiada membatasi jumlahnya. Beberapa mata-anggaran tertentu yang lazim bagi usaha swasta, seperti biaya asuransi dan pembayaran kepada kantor pusat, juga bisa ditransfer. Namun dibawah pasal 20, repatriasi modal tidak diperkenankan selama pembebasan pajak serta kelonggaran-kelonggaran lain masih berlaku.

Sangat penting juga adalah Peraturan Pe.aksana Kebijakan Penanaman Modal Asing di Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 1967, yang mengemukakan urutan prioritas investasi dalam rangka kebijaksanaan perekonomian keseluruhan yang ditempuh oleh Pemerintah. Khususnya disebutkan tiga golongan :

1. Penanaman modal asing yang bisa menambah penerimaan valuta asing, seperti pertambangan, ekspor hasil pertanian, dll.
2. Penanaman modal yang memungkinkan substitusi impor.
3. Penanaman modal yang sekalipun tidak secara langsung mempengaruhi volume valuta asing namun bersifat quick-yielding, menambah kesempatan kerja, memasukkan teknologi baru, atau membawa perlengkapan modern.

Bersambung ke hal. 45



**BESTBOURNE LIMITED**

17 Little Titchfield Street  
LONDON, W1P 7 FG  
Cable : Bestbourne, London W.1.  
ENGLAND

Menginginkan hubungan dengan produsen/eksportir barang-barang terbuat dari kulit, termasuk bahan pakaian, di Indonesia.

\* \* \*

**BRDR. RASMUSSEN  
KUNSTINDUSTRI**

66, Arnold Niensens Blvd.  
DK 2650 COPENHAGEN HV  
DENMARK

Importir terkemuka di Skandinavia untuk souvenir, pecah-belah, dan gelas. Mencari hubungan dengan eksportir barang-barang tersebut di Indonesia yang bersedia mengekspor ke Skandinavia.

\* \* \*

**ROTEXMEDICA GMBH  
PHARMACEUTICAL SPECIALTIES**

2 HAMBURG 39  
KÖRNERSTRASSE 34  
P.O. BOX 390 408  
TELEX 02 12738 CABLE : ROTEXMEDICA  
GERMANY

Bergerak dalam ekspor preparat-preparat farmasi, dan ingin mencari hubungan dengan importir atau gabungan pengusaha dalam bidang tersebut di Indonesia.

\* \* \*

**CONSOLIDATED SHIPPING AND TRADING  
COMPANY**

Shipping - Air Services - Import - Export -  
Insurance  
P.O. BOX 4QT  
119 OXFORD STREET  
LONDON, W1A 4QT  
CABLE : COSHIPTRA LONDON  
Telex : 28604  
ENGLAND

Selain bergerak dalam bidang shipping, air services, impor, ekspor, chartering, asuransi, juga bergerak dalam bidang penyediaan kredit finansial dalam jumlah berapa-pun, serta pembangunan proyek Industri

- segala macam pabrik
- landasan udara
- hotel
- galangan kapal
- bangunan segala macam
- jembatan
- teknik industri
- fondasi
- air conditioning
- Ventilasi
- computer
- jalan raya
- irigasi
- bangunan pelabuhan dan pantai
- industrial & housing estates
- water supply dan pembuangan

Mencari hubungan dengan pengusaha-pengusaha atau instansi-instansi pemerintah yang ingin menggunakan jasa perusahaan tersebut dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas.

# Beberapa Titik Kelemahan Management di INDONESIA

---

B. N. MARBUN

*Dapatkah manager dididik? Apakah benar dugaan yang umum berlaku bahwa manager seperti halnya pemimpin atau „leader” adalah bakat2 yang dibawa sejak lahir? Di manakah para manager mendapat pendidikan, atau lebih singkat bagaimana mempersiapkan dan menyemaikan manager?*

*Rangkaian pertanyaan di atas ini lebih menarik lagi, karena pada akhir2 ini iklan di surat2 kabar ramai mencari manager yang bermutu. Banyak berita mengatakan bahwa dunia usaha pribumi Indonesia belum mempunyai management yang baik. Demikian pula berita tentang banyaknya perusahaan negara yang mismanagement.*

Variasi berita-berita di atas lebih beraneka warna lagi di mana perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut dan tidak ditangani oleh manager-manager profesional, kemudian dapat bangun kembali setelah diadakan reorganisasi management-nya.

Bukan rahasia pula bahwa perusahaan asing dan joint ventures di Indonesia kebanyakan di-manage atau dipimpin oleh orang asing. Banyak hotel besar Indonesia "terpaksa" dipimpin oleh orang asing.

Dalam masyarakat ada anggapan bahwa orang asing, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia perusahaan dan administrasi sipil, mempunyai ketrampilan dan kemampuan management lebih baik dari bangsa sendiri. Tetapi kenyataan kenyataan sehari-hari yang jelas ialah bahwa setelah management luar negeri diizinkan masuk lagi ke Indonesia sejak tahun 1966 serta setelah adanya reorganisasi dan pergantian management di peru-

sahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan vital lainnya sejak tahun 1967, mulailah terasa adanya perkembangan ke arah rasionalisasi dalam mencapai tujuan (objectives) perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Penulis setelah beberapa lama mengadakan pengamatan dekat terhadap tahap pendidikan management di Indonesia serta perbandingan sepintas dengan keadaan-keadaan yang dialami dan dilihat sendiri, mencoba melukiskan realita dan prospeknya serta perbandingan sepintas lalu.

Sepintas lalu dapat disebut bahwa pada periode 1950 — 1958 di Indonesia sudah terdapat bibit-bibit management yang baik, sebagai warisan Belanda. Tetapi tunas ini sangat labil karena umumnya person-person tersebut baru menduduki eselon-eselon menengah pada perusahaan-perusahaan besar warisan Belanda atau pemerintah. Kemudian tunas ini terpukul dengan adanya perubahan situasi politik,

di mana seharusnya tunas-tunas ini yang harus dipromosikan menduduki top management yang tiba-tiba lowong dengan puangnya orang-orang Belanda, ternyata diisi oleh pendatang-pendatang baru yang masih belum biasa dengan dunia usaha. Tunas-tunas management ini sebagian patuh hati, ditentang ke luar atau mengikuti situasi sebagai pemain-pemain sandiwara mengikuti kehendak sutradara atau producer. Akhirnya dalam keadaan yang mendekati khaos 1959 — 1967 management Indonesia boleh disebut setengah lumpuh.

Kelompokan di atas berakibat lebih parah lagi karena alasan suasana politis 1959 — 1966, seperti rangkaian mata rantai di mana perkembangan pendidikan management di Indonesia ikut lumpuh atau dilupakan sama atau sejajar dengan nasib dunia pendidikan di Indonesia. Lahirlah "management tanpa definisi", dan "management komando", dan "gotong royong" yang tidak mempunyai rumusan dasar landasan serta batas-batas yang jelas dan konkrit.

Periode 1966 — 1970 merupakan masa transisi yang merupakan "kelahiran kembali" praktek management di Indonesia. Kelahiran ini penuh dengan derita dan pengorbanan, terutama karena kurangnya persiapan, human resources yang terbatas, skill dari modal yang sudah Senin-Kemis, dan beratnya saingan dari luar. Tetapi setiap usaha perbaikan adalah tidak pernah terlambat dan selalu perlu.

Dalam rangka Repelita I yang sudah hampir selesai terasa dengan sangat kurangnya management yang baik dari segi kuantitas dan kualitas. Untuk Pelita II dan seterusnya prospeknya belum begitu jelas.

Pokok persoalan dari realita kondisi management di Indonesia pada periode yang lalu dan periode yang akan datang, pada dasarnya terletak pada sistim dan realita pendidikan management di Indonesia dahulu, sekarang dan dimasa yang akan datang.

Secara umum dapat disebut bahwa sampai kini kebanyakan penduduk pribumi Indonesia belum banyak berkenalan dan mengerti serta meresapi prinsip-prinsip management modern baik yang berlaku di Barat dan Australia, di Jepang maupun sistim-sistim lainnya secara konsekwen. Banyak prinsip-prinsip pokok management modern sepintas lalu bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai hidup tradisionil Indonesia seperti pemikiran kritis, logis, cepat, ekonomis, praktis, proffit, time is money, kompetisi dan lain-lain. Rata-rata orang pribumi Indonesia masih terikat dengan nilai-nilai hidup tradisionil seperti

"keluarga besar", kampung halaman, lambat asal selamat, selamat, "jam karet", besok masih ada waktu, tradisionil, konvensional, statis, tafsiran religi yang dihubungkan dengan magi dan seterusnya.

Sampai kini, penerobosan atau pelompatan dari tradisi yang kurang cocok dengan prinsip-prinsip management ini masih belum berhasil. Dulu beberapa gelintir pemuda angkatan '28 yang kemudian telah merupakan inti gerakan kemerdekaan sesudah tahun 1945 mencoba meninggalkan cara berfikir tradisionil, tetapi tidak begitu berhasil. Namun demikian harus diakui generasi inilah peletak batu fundasi management modern di Indonesia. "Generasi tahun 1928" mula-mula kurang diterima dan diakui oleh sekelilingnya. Di antara generasi ini dengan generasi selanjutnya terasa ada "gap". Kekosongan atau jurang inilah merupakan kondisi yang berlaku sejak tahun 1966, dimana ketika diperlukan bibit dan kader serta expert management ternyata persediaannya sangat tipis di bumi Indonesia yang berpenduduk ± 125 juta ini.

Tipisnya persediaan/penemuan manager yang baik di Indonesia hampir sama dengan mencari pelari-pelari atletik untuk lari 100 m dengan waktu 10,5 detik, walau waktu tersebut tidak begitu ideal lagi bagi banyak pelari-pelari di negeri lain.

#### Kenapa harus demikian ?

Untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah. Tetapi beberapa alasan umum yang dapat kita peroleh di sini antara lain :

- a. rata-rata orang pribumi Indonesia masih bermental agraris dengan lingkungan kehidupan desa, atau mau mencoba mengkombinasi kehidupan business modern dengan tradisi "tedak siti" yang dalam realitanya bagaikan usaha mencampur air dengan minyak.
- b. cara-cara bertindak orang Indonesia umumnya belum "business like" dan zakelirk. Tradisi desa yang mau terus dinikmati dikota-kota. Selamatan 3 hari lamanya dan seterusnya.
- c. selama ini tujuan pendidikan di Indonesia (terutama orangnya) ialah untuk menjadi pegawai negeri atau mental priyayi dan "tuan besar" pang kecil, atau tuan-tuan kecil.
- d. karena kondisi politik (terutama periode 1959 — 1966) telah memukul rubuh perusahaan pribumi yang sebelumnya bekerja dengan prinsip management modern yang digantikan dengan

mode lisensi, spekulasi, korupsi, sogok, asal Bapak senang dan lain-lain. Tidak adanya kompetisi yang serius dan zakelijk selama periode tersebut.

- e. kurangnya sekolah menengah kejuruan yang praktis yang merupakan landasan dari management modern.
- f. disamping itu selama ini orientasi pemerintah Indonesia dan rakyat umumnya dan juga dunia usaha di Indonesia tidak mengusahakan secara serius pembukaan kursus-kursus management, supervisor dan training-training ketrampilan lainnya secara konsekwen dan berdasarkan planning yang teratur.

Memang selama ini di beberapa fakultas di Indonesia ada mata kuliah serta lembaga-lembaga management. Tetapi kegiatan-kegiatannya sangat terbatas dan umumnya hanya meliputi pemindahan ilmu-ilmu management luar negeri secara teoritis. Kebanyakan mahaguru dan asisten serta mahasiswanya rata-rata tidak pernah mempunyai pengalaman bekerja atau aktif dalam bidang management perusahaan. Untuk orang-orang awam istilah management umumnya atau sering dikaitkan dengan pengertian pimpinan/kepemimpinan dalam politik atau pemerintahan.

Secara umum dapat disebut bahwa sampai 1966 praktisnya di Indonesia belum terdapat satu lembaga khusus yang menspesialisasikan diri dalam bidang management training secara konsekwen seperti telah dipunyai oleh negara-negara tetangga Indonesia maupun di negeri yang sudah maju.

Training management, baik program untuk top management dan middle management dilaksanakan dengan metode modern dengan meninggalkan sistim kuliah (membatasi sampai sekitar 35%). Acara training diisi dengan "role playing", "business game", "discussion", "case method". kunjungan ke pabrik, in-job-training dan lain2.

Mungkin metode-metode dan sistimatik tersebut telah dikenal namanya di Indonesia. Tetapi belum tentu telah meresapi arti praktis dari konsep-konsep tersebut. Dugaan ini kita dasarkan karena minimnya instruktur-instruktur yang cukup berpengalaman di Indonesia.

Banyak ahli management Indonesia, karena alasan keuangan lebih suka atau terpaksa pergi ke luar negeri, atau bekerja pada perusahaan asing atau swasta lain. Di Jakarta baru pada akhir tahun enam puluhan mulai dirintis arah ke pembinaan dan pendidikan management secara terarah dan konsekwen. Disini kita tidak bermaksud mengecilkan arti atau peranan beberapa ahli management Indonesia yang jumlahnya dapat dihitng dengan jumlah jari tangan. Tetapi menurut pengamatan penulis sendiri, bahwa ahli-ahli yang sedikit jumlahnya ini lebih banyak habis waktunya untuk pidato-pidato, pergi ke luar negeri, seminar ini dan itu sehingga praktis tenaganya tidak penuh ditumpahkan untuk pembinaan management yang konkrit dan konsekwen di Indonesia.

Sampai sekarang dari jumlah sarjana-sarjana Indonesia yang melimpah itu, mereka belum menampilkan buku-buku management yang bermutu. Hampir semua alat-alat training dan buku serta metode training adalah jiplakan atau pengambil alihan metode luar negeri ke Indonesia. Terminologi atau istilah-istilah management di Indonesia masih kacau balau dan bersimpang siur. Juga Perhimpunan Management Indonesia (Permanin) ternyata tidak berdaya banyak dalam mengisi kekosongan persediaan manager dan management yang baik di Indonesia.

Untuk masa depan Indonesia mulai sejak sekarang telah harus menyediakan fasilitas pendidikan management yang lebih konkrit, terarah berikut planning dan persiapan yang konkrit dan konsekwen. Penertiban dan perluasan sekolah jurusan dan penanaman disiplin yang ketat berikut pembekalan pengalaman praktek pada pelajar dan mahasiswa yang mau berkecimpung di bidang management. Mengusahakan research yang bertanggung jawab mengenai "training needs" dan registrasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang kita punyai dalam bidang pendidikan management. Seminar-seminar paksaan yang hasilnya masih diragukan lebih baik uangnya dialihkan ke arah research atau studi ke luar negeri.

Indonesia dalam lingkungan keluarga dunia harus menyadari bahwa kemajuan teknologi modern dan persaingan yang mengarah tingkat universal harus dihadapi dengan persiapan managerial skill yang bertaraf internasional juga. Kalau tidak kelak hanya mempunyai management kelas dua dalam lingkungan business dan management internasional.

## Bantuan Dari IGGI

Negara2 donor anggota IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) memberikan tambahan bantuan ekonomis \$ 53,6 juta kepada Indonesia dalam tahun fiskal 1972 — untuk melawan efek2 devaluasi dollar dan revaluasi mata uang negara2 donor lainnya.

Permintaan Indonesia bulan Desember 1971 akan bantuan \$ 670 juta telah disetujui. Namun dalam pertemuan IGGI tanggal 25—26 April 1972, ketika masing2 negara mengemukakan secara resmi jumlah yang bersedia mereka berikan, ternyata jumlah keseluruhannya dalam nilai tukar dollar saat itu mencapai \$ 723,6 juta.

Bantuan yang bersifat bukan-pangan berjumlah \$ 605,3 juta, dibandingkan dengan 560 juta dollar yang dijanjikan bulan Desember 1971, sedangkan bantuan-pangan adalah sebesar \$ 118,3 juta (\$ 110 juta bulan Desember 1971).

Perincian adalah sebagai berikut (dalam jutaan dollar)

AUSTRALIA 24,4; BELGIA 6,1; KANADA 16,7; DENMARK 4,2; PERANCIS 20,6; REPUBLIK FEDERASI JERMAN 46,8; JEPANG 185; INGGRES 26,1; AMERIKA SERIKAT 203; WORLD BANK dan ASIAN DEVELOPMENT BANK ber-sama2 145; ITALIA belum menyatakan jumlah yang pasti pada saat pertemuan.

Bantuan JEPANG terdiri atas devisa kredit (foreign exchange credit) \$ 55 juta, bantuan proyek sebesar \$ 95 juta yang diperinci lebih jauh sebagai pinjaman untuk proyek dan perkembangan melalui sistim perbankan \$ 86 juta dan pengeluaran lokal \$ 9 juta.

Bantuan pangan adalah sebesar \$ 35 juta (230.000 ton beras terdiri atas bantuan pangan ex-Kennedy Round dalam bentuk grant dan beras atas kredit

ekspor). Proyek secara individu dibicarakan dalam pertemuan terpisah bulan Juni.

Bantuan Jepang dikenakan bunga tiap tahun sebesar 3%, yang akan dibayar kembali dalam jangka waktu 25 tahun, termasuk grace period 7 tahun.

Bantuan beberapa negara lain bersyarat lebih lunak. Misalnya Republik Federasi Jerman memberikan bantuan dengan tingkat bunga yang lebih rendah, dan jangka waktu pembayaran kembalinya 30 tahun, termasuk grace period 10 tahun.

Jangka waktu pembayaran kembali kepada negara2 lain berkisar antara 25—30 tahun dengan grace period antara 7—10 tahun dan bunga tiap tahun sampai paling tinggi 3%. Bantuan Inggris tidak dikenakan bunga.

Bantuan INGGRES £ 3 juta untuk impor barang2 yang vital. Dewasa ini sedang dirundingkan beberapa persetujuan untuk sejumlah proyek: pembangkit tenaga di Bali, rehabilitasi dan pengembangan sebuah pabrik tekstil besar, turbo generator untuk pabrik2 gula, alat2 pembantu navigasi udara dan laut, dan mesin2 untuk sebuah pabrik teh. Program bantuan teknis Inggris kepada Indonesia dalam periode 1972—1973 diperkirakan akan bernilai 40% lebih tinggi daripada £ 500.000 yang diberikan tahun lalu.

Bantuan pangan KANADA meliputi pembiayaan seluruh ongkos pengangkutan bahan pangan dari Kanada ke Indonesia. \$ 3 juta dialokasikan untuk proyek2 bantuan teknis, dan sisanya dipergunakan untuk pengisian Perjanjian Devisa Kredit yang ditandatangani bulan September 1971, dimana Kanada menyediakan valuta asing untuk impor barang2 dari Kanada ke Indonesia.

Pertemuan IGGI yang selanjutnya akan diadakan pada bulan Desember 1972.

## Penanaman Modal Jepang di Luar Negeri

Penanaman modal diluar negeri oleh perusahaan swasta Jepang telah meningkat dengan menyolok sejak tahun 1968. Sampai dengan bulan Maret 1972 yang lalu tercatat sebanyak US \$ 450 juta. Penanaman modal ditahun 1969 mencapai jumlah US \$ 600 juta dan ditahun 1971 berjumlah US \$ 700 juta.

Demikian dilaporkan oleh Badan Perdagangan luar negeri Jepang (Jetro). Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa penanaman modal dinegara2 yang sedang berkembang merupakan bagian terbesar. Bahkan untuk negara2 Amerika Latin dan Asia merupakan 63% dari seluruh penanaman modal. Selanjutnya Jetro memperkirakan bahwa penanaman modal luar negeri terus akan meningkat dan untuk tahun 1980 akan

mencapai kira2 US \$ 2.500 juta sampai US \$ 3.000 juta.

Dikatakannya selanjutnya bahwa dalam hal ekspor modal Jepang berada jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan negara2 lain lainnya. Namun pada tahun 1980 yad. Jepang akan merupakan negara pengeksport modal terbesar setelah Amerika Serikat. Beberapa masalah yang dihadapi menurut Jetro adalah masalah nasionalisme ekonomi di-negara2 yang sedang berkembang yang merupakan masalah terbesar. Sedang masalah2 lain disebutkan a.l. kesulitan memperoleh bahan baku dan onderdil setempat, kekurangan buruh terlatih, rintangan bahasa dan adat istiadat, sistim pasaran setempat yang masih terbelakang dan kurangnya pasaran modal pada pasar uang setempat.

# Peranan Indonesia didalam Usaha untuk mengatasi kesulitan mengenai sistim Moneter Internasional

D A N  
PERANAN LUAR NEGERI DIDALAM USAHA STABILISASI  
EKONOMI I N D O N E S I A

R.E.A. MAMOER

Kita boleh bangga, bahwa Indonesia makin sering disebut-sebut sebagai salah satu pemegang peranan didalam kegiatan2 untuk menyusun kembali sistim moneter Internasional. dalam hal mana lagi dipikirkan jalan keluar dari kesulitan2 yang di timbulkan oleh kedudukan dollar Amerika Serikat sebagai Valuta pokok (Key Currency), yang karena defisit terus menerus dari Neraca Pembayaran Amerika Serikat, valuta tsb. tidak dapat dipertahankan konvertibilitasnya terhadap mas, seperti telah dinyatakan dengan kebijaksanaan Pres. Nixon tgl. 15 Agustus tahun 1971.

Dollar Amerika Serikat tidak dijamin lagi dapat ditukarkan dengan mas. Puluhan mungkin ratusan milyar dollar di luar Amerika Serikat terutama di Eropa Barat, Jepang dan beberapa centre lainnya lagi. menjadi hangat, mau keluar dari tangan para pemiliknya, untuk sedapat mungkin bisa ditukarkan dengan mas atau valuta2 lainnya yang kuat dan konvertibel.

Karena hal, yang merupakan merosotnya kepercayaan terhadap dollar itulah, kursnya turun dan dengan demikian sistim moneter Internasional, yang sedari perjanjian Brettonwoods 1945 sampai awal dekade 70-an ini. bersandarkan kepadanya, menjadi kehilangan landasan pokoknya. Dollar yang selama ini menjadi alat pengukur nilai yang tetap, dari valuta2 lainnya dan merupakan unsur terpenting dari cadangan2 moneter berbagai negara, nilainya berubah-robah cenderung terus merosot.

Federal Reserve Bank of America tidak bersedia lagi untuk menukarnya dengan mas, seperti biasanya dilakukannya pada waktu2 sebelumnya.

Dollar Amerika Serikat jatuh setelah ia berhasil lebih dari duapuluh tahun sesudah 1945 mentulang-punggungi stabilitas moneter Internasional, didalam suatu sistim yang biasa disebut "the adjustable peg system". yang dilengkapi dengan suatu forum musyawarah didalam bentuk I. M.F. sekarang ini.

(Keterangan: To peg = mengikatkan)

Adjustable peg system, dapat kita diartikan: Suatu sistim moneter Internasional, dimana kurs valuta2 diikatkan kepada nilai dollar AS dan yang sewaktu-waktu dapat dirobah atau disesuaikan menurut keadaan. Proses penyesuaian tsb. dilakukan oleh negara negara ybs bersama-sama I.M.F. Kurs valuta2 terhadap dollar Amerika Serikat dirobah-robah berdasarkan mufakat menurut keperluan.

Negara2 yang sudah maju industrialisasi, dimana terjadi pertukaran barang/jasa dan pelaksanaan pembayaran sangat cepat, memerlukan sekali alat pembayaran yang nilainya tetap dan konvertibel penuh. artinya dapat diterima ditukarkan dengan valuta mana saja, dimana dan kapan saja.

Sifat2 inilah yang harus dimiliki oleh sesuatu alat pembayaran atau valuta, bila ia mau berfungsi sebagai pelayan dan penolong dari suatu ekonomi yang telah berkembang dan maju dengan pesatnya seperti telah dicapai oleh beberapa negara di dalam abad Technology-computer dewasa ini.

Dalam pada itu, kenyataan menunjukkan, bahwa technology modern ini, baru mampu memberikan kenikmatan materi yang wajar sampai kepada yang berlimpah-limpah, kepada hanya kurang dari 1/3 penduduk dunia ini, angka mana akan menjadi lebih kecil lagi, apabila gejala2 sosial ekonomi dan etnologi seperti nampak sekarang, tidak dibelokkan kepada arah yang lebih tepat, dengan tujuan memperbesar bagian penduduk dunia, yang diuntungkan oleh Technology-computer tsb.

Kita, bukan tidak mengerti pentingnya sifat konvertibel penuh dari sesuatu alat pembayaran Internasional, tetapi secara terus terang didalam situasi atau tahap ekonomi yang kita tempati dewasa ini belum terasa kebutuhan secara mutlak terhadap sesuatu valuta Internasional seperti dimaklud diatas.

Kepentingan kita yang langsung mengenai kebutuhan ini sesuai dengan tahap ekonomi yang baru di capai, adalah terletak didalam gaya personal approach dan mutual understanding yang kita harus lakukan terhadap mereka yang telah maju, tetapi yang tidak membahayakan politik ideal ataupun falsafah hidup dari kita sendiri.

Begitu pula kita harus memperhatikan pentingnya kerja-sama dengan negara2 senasib kita.

Kita pada umumnya lebih berkepentingan dengan Multilateral approach yang terbatas ataupun pendekatan2 bilateral secara khusus dan berdasarkan kasus2 tertentu ybs.

Suatu pendekatan secara umum, dengan menentukan sesuatu mekanisme yang berlaku secara universal, seperti misalnya dengan menemukan atau menentukan suatu atau beberapa Valuta Internasional yang beredar secara universal, masih belum begitu langsung menyangkut kebutuhan kita, yang masih banyak memerlukan penanganan secara lokal, regional atau insidental, bila dinilai dari sifat universalismenya Technology-Computer dewasa ini.

Bahwa kita sebagai wakil dari golongan Developing Countries, malahan mengetuai kelompok 20, yang terdiri dari 11 maju dan 9 terbelakang, merupakan su-

tu kesempatan yang baik bagi penentuan suatu Sistem Moneter Internasional yang baru, yang masih berkembang.

Kepentingan negara2 maju, lebih terletak pada adanya mekanisme yang bekerja secara internasional, kearah terlaksananya liberalisasi lalu lintas ekonomi internasional, sedangkan kepentingan negara2 berkembang terletak pada penyimpangan2 dari pengaturan Internasional-Multilateral itu, dan memerlukan penanganan2 secara lokal regional ataupun nasional-individual.

Proteksi2 selektif ataupun partiil sering sangat diperlukan oleh negara2 berkembang, sambil tidak usah merugikan negara2 partner yang sudah maju.

Baik sejenak dilintaskan kedalam pandangan kita ialah, bahwa seperti halnya didalam kehidupan ekonomi nasional, lembaga perbankan yang matang menguntungkan keadaan ekonomi ybs dan ahli2 perbankan yang cakap, sangat mendorong kenaikan produktivitas sektor produksi umumnya dan banknya sendiri mengalami kemajuan sebagai rumah tangga produksi/komersil, maka kedudukan kita didalam forum Internasional sebagai unsur yang dipercayai untuk membina usaha2 menyusun kembali sistem moneter Internasional, merupakan suatu posisi yang tidak merugikan kita, malahan dapat sangat menguntungkan Indonesia.

Kita sekurang-kurangnya dapat ikut berbicara dan malahan dapat mengarahkan jalan pembicaraan para ekspert moneter dan perbankan kepada penemuan suatu sistem moneter yang menguntungkan negara2 berkembang sambil memenuhi kebutuhan negara2 yang sudah maju.

Yang diperlukan adalah suatu perumusan umum, yang menyodorkan suatu mekanisme penukaran / pembayaran Internasional, yang terdiri dari Valuta2 dari beberapa negara yang ekonominya stabil dan valutanya konvertibel penuh.

Suatu sistem yang berlandaskan kepada lebih dari satu valuta, tetapi kepada beberapa valuta yang sama2 kuat secara bertahan, akan lebih baik, daripada yang hanya berlandaskan satu valuta saja.

Interconvertibilitas antara Valuta2 ini harus diatur sebaik-baiknya tanpa tertutupnya kemungkinan2 untuk recheck menurut keadaan. Peranan S.D.R: (special drawing-right) dapat disesuaikan kepada apa yang telah diatur mengenai Valuta2 pokok tadi. Sistem yang baru hendaknya lebih banyak berisikan unsur2 kemungkinan untuk mempertebal kesadaran solidaritas ekonomi Internasional.

Disamping itu harus ada pengaturan untuk memenuhi kebutuhan negara2 berkembang, tanpa merugikan negara2 yang sudah maju pada umumnya.

Sistim baru ini harus mendorong untuk mempertinggi kesadaran kerja sama ekonomi Internasional.

Peranan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia sebagai mediator untuk kepentingan2 kelompok negara2 berkembang agar lebih diaktifkan dan ditonjolkan, disamping peranan2nya yang telah ada, sebagai stabilisator kurs (I.M.F.) dan sebagai sponsor dari pembangunan dan rehabilitasi ekonomi (Bank Dunia) yang bersifat untuk umum.

Renungkanlah pula selanjutnya, bahwa putra2 Indonesia telah memperlihatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas2 toplevel diforum Internasional, baik itu mengenai bidang politik, ekonomi, sosial maupun kulturil.

Kita perlu menyadari, betapa kita harus bergegas-gegasnya didalam Negeri, untuk mengisi kekosongan2 yang mengenai keahlian dan kejuruan dalam level menengah dan level pelaksanaan bawah.

Skil dalam tingkat medium dan lower management dan pada tingkat manual work sangat terbatas dalam jenisnya dan jumlahnya. Ekonomi terlalu dibebani oleh pengangguran tak kentara pada sektor Pemerintahan dan Pertanian, terlalu banyak tenaga potensiil yang tidak dapat ikut diproduktifkan, terlalu banyak right-men with no job but wrongmen with many jobs.

Sukses yang telah dicapai diforum Internasional akan lambat laun berbalik menjadi pukulan diatas muka kita, apabila kita tidak mampu memberikan follow up pertanggung jawaban terhadap kewajiban2 Internasional karena kondisi di Dalam negeri tidak mensupport dapat dilakukannya follow-up tadi.

Hukum noblesse-oblige, meminta kita melaksanakan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Menyinggung sebentar mengenai ekonomi didalam negeri, ingin dikemukakan sekedar ulasan sebagai berikut. Stabilitas ekonomi seperti biasa kita katakan telah tercapai didalam negeri, sebetulnya baru merupakan stabilitas moneter.

Dengan cukupnya tersedia cadangan devisa yang kita kuasai melalui bantuan2 Luar Negeri maka kita dapat mempertahankan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dalam bandingan rata2 Rp. 415.— per U.S. \$ 1 jadi masih tetap pada kurs yang secara resmi ditentukan oleh

Pemerintah bulan Agustus 1971, sebagai tindakan penyesuaian terhadap kebijaksanaan Pemerintah Amerika Serikat yang diumumkan tgl. 15 Agustus 1971 itu. Devaluasi Rp. sebesar 10%).

Dengan ikut sertanya Pemerintah didalam pasaran Valuta Asing di Indonesia, sebagai penjual dan juga sebagai pembeli, maka dapat dipertahankanlah kurs rupiah pada tingkat mana saja menurut yang dikehendaki dan diperlukan oleh Pemerintah. Kita tahu, bahwa stabilitas moneter ini, belum memberikan stabilitas ekonomi, didalam arti, bahwa disegala bidang pada umumnya terdapat keseimbangan antara permintaan dan penawaran dimana misalnya terlihat jumlah pengangguran tidak terlalu besar, daya beli masyarakat cukup tinggi untuk dapat membeli barang2 yang diwajibkan dsb.

Untuk mencapai itu sekarang, masih terlalu banyak faktor2 yang menghambat untuk menjamin bisa sepadannya demand supply pada suatu tempat, suatu waktu yang sama. Hambatan2 tsb. untuk jangka pendek dapat diatasi dengan menormalkan keadaan sarana2 perhubungan, angkutan dan penertibannya.

Dalam pada itu, tanpa penguasaan moneter seperti digambarkan sepintas lalu itu, kita tidak akan mampu mempertahankan harga pada tingkat yang bergerak pada batas2 yang masih dapat ditolerir. Tekanan2 inflasi boleh dikata tidak terjadi dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat boleh dikatakan stabil pada k.l. 415.

Stabilitas kurs ini dapat memberikan kesan/perasaan bahwa harga2 pun stabil, dus ekonomi pun stabil, kata orang. Pendorian Gustav Cassel yang mengatakan, bahwa kurs dipengaruhi oleh perubahan2 tingkat harga dan bahwa kebalikan dari pada teori tsb. yang menyatakan, bahwa tingkat harga dipengaruhi juga oleh perubahan2 kurs Valuta negara ybs, sekarang lagi membuktikan kebenarannya didalam fenomena ekonomi Indonesia dewasa ini.

Stabilitas moneter yang ditunjang oleh bantuan2 moneter/finansiil dari LN, sambil menunggu tercapainya stabilitas ekonomi yang sebetulnya, memerlukan a.l. kebijaksanaan2 seperti, balance budget, tingkat bunga yang tinggi, pajak yang tinggi, perangsang2 bagi modal asing dsb.

Inj dapat mengakibatkan a.l. pengeangan pengeiuaran2 Pemerintah, yang mengakibatkan turunnya income, terdesaknya income, terdesaknya investasi riil oleh investasi finansiil, yang sering bersifat spekulatif, rentabilitas usaha neto menjadi nega-

tif, saingan berat dari modal asing yang mendapat perangsang2 tadi dan saingan dari para spekulasi dan manipulator2 lainnya memukul pengusaha2 dalam negeri yang telah ada yang umumnya bermodal kecil.

Dengan terjadinya hal2 tsb. yang merupakan hanya sebagian dari pada tafereel yang mengarah kepada suatu keadaan depresi disektor yang kecil modal dan tidak mendapat perangsang2, maka terdengarlah issue mengenai pribumi dan non-pribumi.

Pada saat2 terjadinya ketidak seimbangan antara supply dan demand mengenai suatu commodity, diperlukan intervensi Pemerintah via Bulog, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dsb. Mekanisme pasar dalam bentuk harga, bunga, demand, supply dsb. memerlukan bantuan Pemerintah untuk dapat mempertahankan diri sebagai mekanisme.

Karena itu terjadilah: alat menjadi tujuan dan tujuan dijadikan alat, kunci bukan untuk mengunci pintu, tetapi pintu untuk menempatkan kunci. Didalam berlimpah-limpahnya kekayaan tambang, hutan, laut dan kekayaan2 alam lainnya, dimana kita berperan sebagai penjual tunggal, maka terlalu sibuklah kita dengan melayani para pembeli dan langganan, sampai nanti datang saatnya, semuanya habis terjual, tanpa cukup investasi modal atau investasi keahlian dan skill yang telah terlaksanakan sebelumnya untuk mempraktekkan pengalaman kita dan berdiri sendiri dengan sumber2 yang mungkin sudah kosong nanti.

Indonesia yang nanti akan berpenduduk lebih atau beberapa lipat dari jumlahnya yang sekarang, mungkin akan menghadapi problem yang sampai sekarang tidak dirasa perlu dipikirkan, ialah suatu kekurangan dalam faktor alam (mineral, hutan, keindahan alam dsb. yang bersifat exhaustive deposits).

Dewasa inipun sudah ternyata bahwa negara2 industri yang sudah maju, telah mengambil keperluan2 bahan2nya dari luar (minyak, kayu, besi, nikel dsb.) dan bila melihat hebatnya output dari berbagai eksploitasi yang dilakukan oleh eksploitasi asing di Indonesia, memang ada alasan untuk khawatir apa yang dapat kita pakai nanti, apabila kesanggupan kita sudah ada, untuk menggarapnya sendiri.

Tanpa faktor2, yang sekarang masih banyak terdapat di Indonesia, apa yang dapat diproduksi nanti, apabila sudah memiliki skill yang sekarang kita lagi kejar?

Semacam Malthusian puzzle akan nanti dihadapkan kepada kita, apabila kemampuan tehnik berproduksi sudah ada, tetapi bahan tidak ada. Janganlah kita dapat diibaratkan seperti seorang pemuda, yang mendapat warisan berlimpah-limpah, lalu menjualnya habis2an, tanpa cukup memikirkan hari depannya, dimana dapat terjadi, semuanya habis terjual, tetapi ia sendiri tidak cukup mampu untuk bersaing dengan orang2 lain, yang sudah jauh lebih pintar lagi.

Pemuda ini harus betul2 merencanakan dan melaksanakan secara teratur dan teliti penuh dengan perhitungan2 didalam menghadapi hari depan bagi dia sendiri dan anak-cucunya nanti.

# PENEMUAN

## Baru

Gambar dibawah memperlihatkan sebuah panel sedang diangkat ke tempatnya, dalam pembangunan prototype rumah berdasarkan suatu sistim baru produksi perumahan yang dirancangkan untuk negara-negara berkembang oleh Building Research Establishment di Inggris.

Sistim ini mempergunakan metode "battery casting", dikembangkan oleh Building Research Station beberapa tahun silam, dan telah digunakan untuk memproduksi ribuan tempat tinggal diberbagai bagian dunia. Dengan sistim ini, panel2 beton yang telah di cetak lebih dahulu (pre-cost) diperoleh dengan tidak perlu mendirikan pabrik2 yang mahal. Baterei2 pencetak yang di letakkan di dekat tempat bangunan akan di dirikan, dimana panel2 tersebut dihasilkan, hanya membutuhkan penanaman modal kecil dan perlengkapan mekanis yang minimal.

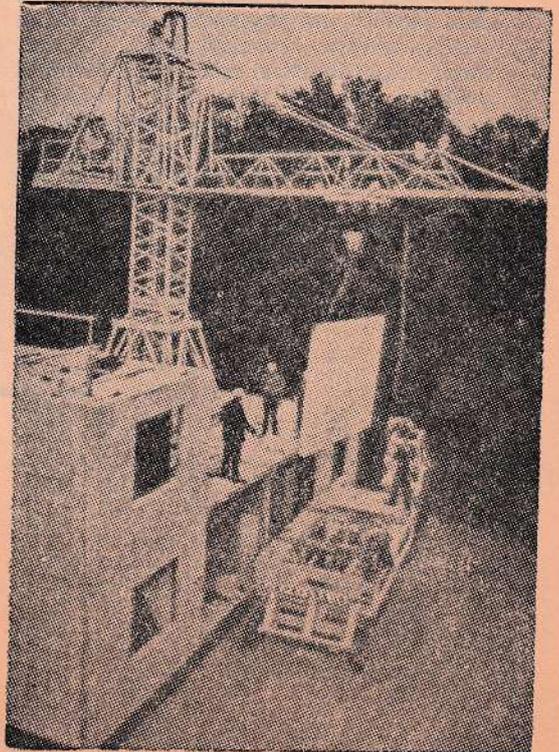
\* \* \*

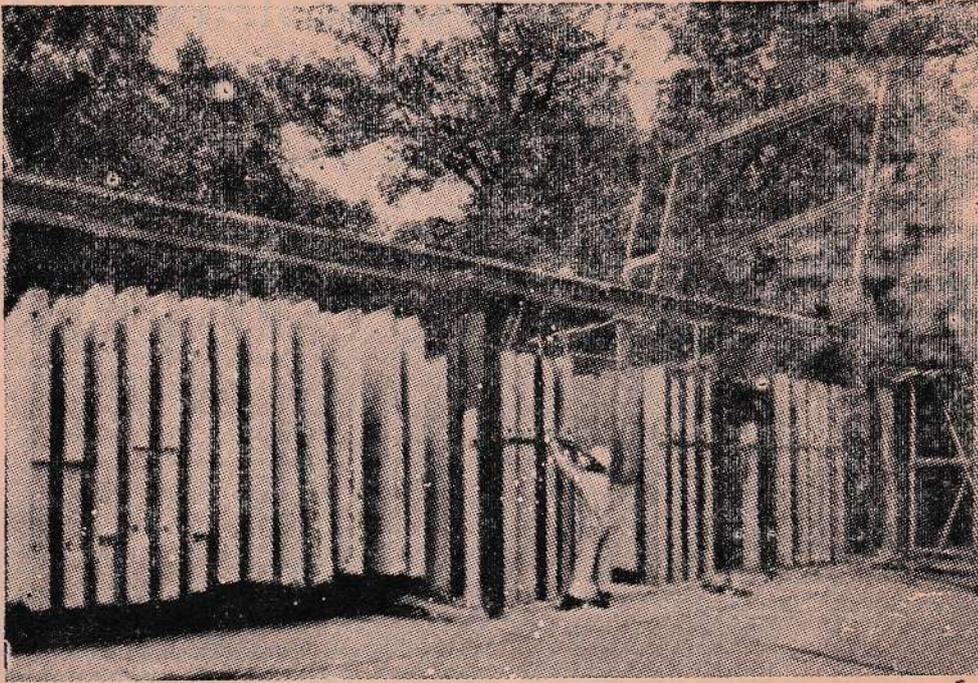
*Casting battery yang mencetak panel-panel beton. (Foto · Trade News from Britain)*

Persyaratan2 perumahan dipenuhi oleh sistim baru ini dengan suatu design struktural yang distandardisasikan untuk pembangunan apartemen-apartemen dengan lebar 8 m sampai setinggi 5 tingkat dan bisa mencapai panjang 8 flat.

Dengan standardisasi ini sekalipun, penampakan keseluruhan bangunannya, pengaturan interior dan semua unsur non-strukturalnya dapat divariasikan menurut kebutuhan2 setempat atau selera individu.

Sebuah derek penyangga yang ringan telah dibuat juga oleh Building Research Establishment untuk mendirikan bangunan semacam ini. Derek tsb bersandar kepada rangka bangunan, tidak memerlukan landasan yang mahal, serta dipergunakan dengan mengambil keuntungan dari hubungan2 struktural diantara panel2 beton itu. Derek tadi digerakkan sepanjang bangunan dan dinaikkan dari tingkat ke tingkat sesuai dengan perkembangan pengerjaan bangunan. Dengan jalan ini, sebuah derek yang relatif kecil jauh lebih murah dapat mengerjakan komponen2 beton yang berat. \* \* \*





## Konsulat Indonesia

Kamar Dagang Melbourne (Melbourne Chamber of Commerce) telah meminta Pemerintah Federal untuk mempertimbangkan didirikannya Konsulat Indonesia di Melbourne untuk mengembangkan perdagangan dan tourisme.

Ekspor dari negara bagian Victoria yang ibu-kotanya Melbourne, ke Indonesia telah meningkat tiga kali lipat selama dasawarsa terakhir ini, dan bisa dipastikan akan meningkat lebih jauh lagi dalam beberapa tahun mendatang. Nilai perdagangan seluruhnya kini melampaui \$ 11 juta.

Sebagian besar dari 28 perusahaan Australia yang ber-joint venture dengan Indonesia, berinduk di Victoria, dan kini menyelenggarakan urusannya melalui Konsulat Indonesia di Rose Bay, Negara Bagian New South Wales.

Kamar Dagang Melbourne yakin bahwa volume perdagangan yang terus tumbuh ini merupakan alasan kuat bagi didirikannya Konsulat Indonesia di Melbourne, untuk hubungan yang lebih erat dengan Indonesia.

Kunjungan wisatawan ke Indonesia juga telah meningkat belakangan ini, dan inipun nampaknya akan berkembang terus dimasa yang akan datang. Travel agencies melaporkan bahwa urusan visa melalui Konsulat di New South Wales kadang2 mengalami kelambatan sampai dua minggu. — (COMMERCE NEWS).

# PROSES INDONESIAISASI Perusahaan Joint Ventures

DEDDI ANGGADIREDJA

## I.

KEHADIRAN modal Asing di negeri kita, pada mulanya mendapat sambutan berbagai pandangan dan sikap, dari mulai yg sinis dan penuh curiga sampai kepada yg pro dan kontra. Perbedaan pendapat dan sikap tersebut, kiranya dapat kita pahami dan adalah sesuatu yang wajar adanya. Apalagi, kalau kita mau meneliti perkembangan pendapat<sup>2</sup> dan sikap masyarakat kita dengan seksama terhadap Modal Asing itu sejak tahun limapuluhan sampai dengan sekarang. Kita dapat melihat pendapat dan sikap yang berubah-ubah, sejalan dengan perubahan kondisi sosial politik yang ada didalam masyarakat kita itu sendiri.

Kita masih ingat, betapa Kabinet Ali Sastroamidjojo pada thn 1953, bak, seorang pria yang ditolak lamarannya oleh calon mertua, ketika rancangan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing yang diajukannya ditolak oleh Parlemen. Akan tetapi lima tahun kemudian, yaitu tahun 1958, ternyata Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing tersebut dapat diterima oleh para wakil rakyat yang terhormat setelah mengalami restriksi-restriksi, dengan disyahnkannya Undang-undang No. 78 tahun 1958. Namun kemesraan berangkulan dengan P.M.A. ini tidaklah berjalan lama, pada tahun 1965 Pemerintah Sukarno berpandangan lain dan

melihat Modal Asing adalah momok yang menakutkan. P.M.A. menurut pendapat Pemerintah Sukarno, dianggap sebagai penghisap keringat dan darah rakyat — ia dianggap sebagai "exploitation de l'homme par l'homme". Maka perceraianpun terjadilah dengan setiap bentuk yang bernama Modal Asing dengan disyahnkannya Undang-undang No. 16 tahun 1965.

## II.

MUNCULNYA Pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Suharto, telah membawa dan menciptakan iklim baru di dalam bidang politik maupun ekonomi. Terjadi banyak perubahan<sup>2</sup> pandangan maupun sikap didalam menghadapi kenyataan<sup>2</sup> yang ada didalam masyarakat. Kenyataan<sup>2</sup> pahit yang mest; diterimanya sebagai warisan Pemerintah Sukarno dihadapi dengan pandangan dan sikap yang *realistis*, yang didasarkan pada fakta<sup>2</sup> objective yang hidup didalam masyarakat. Mengatasi masalah atau problem<sup>2</sup> yang timbul bukan dengan sikap to fight the problem but to solve the problem.

Begitupun pandangan dan sikap terhadap Modal Asing mengalami perubahan pula. Pemerintah Suharto menganggap persoalan Penanaman Modal Asing merupakan salah satu faktor yang penting sebagai pelengkap bagi lajunya pembangunan ekonomi.

Kenyataan2 pahit bahwa kita kurang modal dan valuta asing bagi membangun perekonomian kita yang bokbrok, telah membuat kita sadar bahwa suka atau tidak, mau tidak mau kita harus dapat memanfaatkan Penanaman Modal Asing untuk kepentingan pembangunan ekonomi kita. Kesadaran akan pentingnya Modal Asing sebagai „supplementary development resources” dalam pembangunan perekonomian kita itu, kiranya tidak hanya sampai disana. Karena, bagaimanapun kita menya dari pula bahwa akhirnya kita harus melepaskan diri dari ketergantungan ini. Seperti juga pernah dikemukakan oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikoesoemo (Menteri Perdagangan R.I.) didalam kuliah umumnya di Universitas Negeri Padjadjaran pada bulan Maret 1970, bahwa; „tidak ada satu negarapun yang mempunyai harga diri, yang tidak hendak mengatasi kesulitan2nya atas kekuatan dirinya sendiri”.

Memperhatikan hal2 tersebut diatas, kiranya jelas bahwa kita tidak bisa dengan begitu saja mengundang modal2 raksasa asing untuk datang ke negeri kita. Soalnya banyak berkaitan dengan masalah2 „strategi pembangunan” yang akan kita capai. Mau tidak mau kita harus membuat siasat yang dapat menaruhkannya kepada cita2 pembangunan ekonomi kita itu. Pengarahan inilah kiranya yang teramat penting artinya dan sangat menentukan bagi masa depan nasib bangsa kita. Menentukan dalam arti, apakah bangsa kita hanya akan dijadikan penonton saja dari sebuah arena terbuka, dalam lakon pembangunan ekonomi negerinya sendiri, dengan para pemainnya para pengusaha asing dengan modal2 raksasanya? Atau apakah para pengusaha bangsa sendiri juga akan diberi

kan peranan penting untuk bermain didalamnya?

Seandainya mereka akan dijadikan penonton saja, maka habislah perkara. Lantas, kitapun tidak perlu lagi berbicara tentang harga diri suatu negara atau martabat suatu bangsa, sebagaimana telah dikemukakan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikoesoemo diatas. Kalau demikian, maka kitapun tak perlu lagi bicara tentang keadilan sosial.

### III

TUNTUTAN2 objective diatas kiranya yang menjadi pertimbangan2 Pemerintah Suharto didalam menyusun suatu siasat guna mengundang datangnya modal asing. Siasat mana harus saling menguntungkan kepada kedua belah pihak, yang dapat menjalin suatu kerja sama yang „simbiose mutualistic.”

Undanguan itu sendiri akhirnya lahir dalam bentuk Undang-undang No. 1 tahun 1967, yang didalamnya penuh berisi ketentuan-ketentuan yang luwes dan manis serta bujukan2 bagi investor asing untuk berkenan mau menanamkan modalnya di bumi Ibu Pertiwi kita ini. Disamping itu yg penting sekali adalah termaktub didalamnya berbagai pengarahannya untuk menjaga agar bangsa kita tidak hanya jadi penonton saja dari kemakmuran negerinya sendiri.

Undanguan yang berisi bujukan yang luwes dan manis tersebut, berupa macam2 keringanan termasuk tax holiday maupun pembebasan2 bea masuk, adalah tidak sia2. Hal ini dapat kita lihat dari mengalirnya para investor asing yang berlomba2 menanamkan modalnya di tanah air kita.

Dibawah ini, kita kutipkan data2 yang bersumber dari Sub Panitia Penanaman Modal Asing, Jakarta :

#### PENYEBARAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT NEGARA ASALNYA

Negara Asal	Modal Asing (ribuan US \$)	%	Proyek	%
1. Amerika Serikat	549.622	33,66	72	16,07
2. Jepang	277.378	16,99	79	17,63
3. Philipina	264.000	16,17	15	3,34
4. Hongkong	105.513	6,45	58	12,94
5. Kanada	78.667	4,81	4	0,89
6. Singapura	62.688	3,83	31	6,92
7. Korea	53.400	3,27	4	0,89
8. Malaysia	42.640	2,61	29	6,47
9. Negerland	37.864	2,31	26	5,80
10. Jerman Barat	21.960	1,34	20	4,46
11. Inggris	29.920	1,83	28	6,25
12. Australia	19.860	1,21	21	4,68
13. Negara2 lain	88.980	5,45	61	13,61
25 Negara investor	1.632.532	100,0	448	100,0

Tabel diatas baru mencatat sampai dengan tahun 1971. Jadi kita belum lagi mengetahui berapa jumlah yang ditanam pada tahun 1972. Melihat jumlah diatas saja, kita bolehlah angkat topi bahwa dalam waktu yang relative sangat singkat Pemerintah telah berhasil menarik investor asing dengan jumlah modal yang tidak sedikit. Hal ini, mau tidak mau merupakan gambaran pula dari kepercayaan para pengusaha asing terhadap Pemerintah Suharto.

#### IV.

**DIDALAM** Bab IV Undang-undang Penanaman Modal Asing ditentukan bahwa, dalam rangka PMA, tenaga asing yang boleh dimasukkan ke Indonesia hanyalah tenaga Direksi (executive/Management) dan tenaga ahli dibidang teknik maupun administrative, apabila kedua macam tenaga ahli tersebut belum mampu diisi oleh tenaga Indonesia.

Kemudian didalam fasaj 12, disebutkan bahwa Perusahaan dalam rangka PMA, wajib menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas2 latih dan pendidikan didalam dan/atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi bangsa Indonesia.

Dari dua hal tersebut diatas saja, kita dapat membaca bagaimana pengarahannya diberikan oleh Pemerintah serta pembatasannya, yaitu dengan maksud pertama-tama untuk menggunakan tenaga2 bangsa Indonesia dan untuk mempersiapkan diri apa bila nanti perusahaan2 dalam rangka PMA itu ijin operasinya telah berakhir. Seperti diketahui, bahwa batas ijin operasi Modal Asing telah diatur oleh Undang-undang No. 6 tahun 1968. Yakni bahwa, untuk bidang-bidang perdagangan dan industri, ijin operasionil Modal Asing berakhir sampai dengan 31 Desember 1977. Sedangkan untuk bidang2 usaha lainnya, ditentukan sampai batas antara 25 sampai 30 tahun.

Jadi jelaslah disini bahwa, selama periode Modal Asing tersebut beroperasi sampai dengan berakhir masa ijinnya, di dalam perusahaan2 joint ventures harus ada suatu proses Indonesianisasi. Jaitu suatu proses reshuffle atau penggantian tenaga-tenaga bangsa Indonesia. Proses ini telah sampai dimana?

Beberapa waktu yang lalu, terdengar keluhan-keluhan bahwa Indonesianisasi pada perusahaan2 joint ventures dengan Jepang mengalami kelambatan. Namun sayang ke-

luhan tersebut tidak menjelaskan, faktor2 apa penyebab dari kelambatan itu. Apakah pihak pengusaha Jepang yang mempersulit atau pihak Indonesia (dalam hal ini tenaga-tenaga Indonesia) yang memang lambat menerima metode, teknologi maupun skill yang baru, yang akan diwariskan oleh tenaga-tenaga ahli dari Jepang?

Dari beberapa keterangan yang dapat dikumpulkan, dapat diketahui bahwa pada beberapa perusahaan yang berjoint ventures dengan Jepang, tenaga2 ahli orang Jepang-nya hanya beberapa orang saja. Kebanyakan hanya berkisar antara 3 sampai dengan 5 orang. Misalnya pada P.T. Eisa Indonesia, P.T. National Gobel; P.T. Unilon, PT Tumbak Mas, dll. Hanya pada PT KTSM (Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills) yang berjumlah agak banyak, sesuai dengan besar pabriknya itu sendiri yang berupa integrated mills. Pada PT KTSM ada 20 orang tenaga ahli orang Jepang.

Tenaga2 ahli diatas, ternyata memang hanya menduduki posisi2 yang belum bisa diisi oleh tenaga2 bangsa Indonesia. Sedangkan pekerjaan2 pabrik semuanya telah dikerjakan oleh orang2 kita. Usaha untuk mengganti tenaga2 supervisor dan tenaga2 ahli ini ada juga dijalankan oleh perusahaan2 tersebut. Walaupun tidak sebagaimana kita harapkan. Mengena kelambatan penggantian tenaga2 ahli, beberapa waktu yang lalu bekas Direktur Umum PT KTSM. Hutagalung SH (almarhum) dalam suatu kesempatan: seminar Penanaman Modal Asing di Sukabumi yang diselenggarakan oleh KADIN JABAR dengan Friedrich Naumann Stiftung, pernah mengemukakan kepada penulis, bahwa kelambatan Indonesianisasi tersebut, faktor pengambatnya antara lain adalah kelambatan dari tenaga2 Indonesia sendiri. Jaitu, kurang cepatnya tenaga2 Indonesia untuk menerima transfer of a new method, skill and technology from Japanese. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa pada pabriknya pernah diadakan testing terhadap 26 orang sarjana untuk promosi posisinya, akan tetapi yang lulus hanya 1 orang saja. Kesulitan lainnya memang juga ada antara lain adalah faktor bahasa.

KALAU kita boleh percaya pada apa yang dikemukakan oleh almarhum bekas Direktur Umum PT KTSM diatas, maka bolehlah disini kita mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab kelambatan Indonesianisasi dalam perusahaan2 yang ber joint ventures adalah adanya kelambatan adaptability dari tenaga2 Indonesia untuk menerima atau melaksanakan (proses) Indonesianisasi tersebut. Ada baiknya kiranya kita menerima keterangan itu untuk ber-mawas diri, tanpa melupakan kemungkinan adanya faktor2 penyebab lainnya.

Namun apapun sebabnya, maka keluhan-keluhan tersebut patut mendapat perhatian yang seksama, untuk menjaga agar jangan sampai ketika tiba saatnya in operasi pengusaha2 asing tersebut berakhir tenaga2 Indonesia belum siap menggantikannya. Kalau itu terjadi, maka berulanglah sejarah lama.

Dalam tulisan singkat ini ingin kita menekankan pentingnya suatu kerja sama yang erat; guna menjamin lancarnya pelaksanaan Indonesianisasi tersebut; antara Pemerintah; yang wajib mengawasi pelaksanaan Indonesianisasi pada perusahaan2 Joint Ventures, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang PMA, dengan lembaga/organsasi pengusaha (semacam KADIN) dan Perguruan2 Tinggi atau Lembaga2 Management. Kerja sama ini bisa dalam bentuk penyediaar program2 upgrading course atau training untuk para calon supervisor, tenaga2 executive/management dan tenaga-tenaga ahli administrative oleh lembaga-lembaga tadi, dimana pihak Pemerintah secara intensive melakukan anjuran2 serta pengawasan agar pimpinan perusahaan2 joint ventures itu memberikan fasilitas2 ke pada karyawannya untuk mengikuti kursus-kursus atau training tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-undang No. 1/67.

Mengenai program upgrading courses atau training itu, hendaknya ditujukan untuk mengembangkan pengertian maupun keterampilan yaitu mengenai pengertian organisasi perusahaan sebagai suatu „integrated system”. Keduanya untuk mengembangkan pengertian di dalam bidang2 khusus seperti bidang Marketing Management, Financial Management, Production Management, Personnel Management dan lain2 bidang yang perlu termasuk didalamnya melatih keterampilan untuk memecahkan persoalan2 dan mengambil keputusan, seperti yang telah sering dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Mana-

gement (LPPM) di Jakarta atau oleh KADIN JABAR dan LPKIM di Bandung.

Adapun mengenai metode yang dipergunakan haruslah yang bersifat praktis.

Menurut pendapat dari LPPM dalam buku pedomannya disebutkan bahwa sifat praktis tersebut bisa dilakukan dengan empat jalan, yaitu ; \*).

1. *Case dan Incident Method.*
2. *Simulasi*
3. *Partisipasi*
4. *Follow - up.*

- ad 1. Jaitu suatu metode yang membawa kejadian dalam perusahaan kedalam kelas.
- ad 2. Yang dimaksud dengan Simulasi adalah diciptakannya suasana training yang sedapat mungkin meniru dan mendekati realitas didalam perusahaan. Untuk itu dipakai case dan incident methods; latihan2; role playing, business games dan in-basket exercises. Mengajar (lecturing) dibatasi hanya sampai 40% dari seluruh waktu training.
- ad 3. Dalam partisipasi, peserta2 pada umumnya sudah berpengalaman dan kadang2 mengetahui lebih baik praktek perusahaan daripada instruktur kursus. Oleh karena setiap fase kursus diikuti dengan diskusi antara peserta dengan instruktur, maka bekal yang dibawa oleh mereka masing2 berguna untuk semua peserta.
- ad 4. Peserta kursus melaporkan dan mengadakan analisa dari suatu problem dalam perusahaannya serta merumuskan usul2 kearah perbaikan. Bahan ini dirundingkan dan diperbaiki oleh para peserta lain bersama2 instruktur. Peserta dianjurkan untuk menerapkan usul2nya dalam praktek perusahaan.

Kerjasama yang erat diatas hendaklah dijalankan secara konsekwen, karena mau tidak mau semua itu adalah tanggung jawab bersama. Dengan jalan demikian semoga kita dapat menghindari terulangnya sejarah lama yang tidak kita inginkan.

Demikianlah harapan kita adanya.

\*) *Buku Pedoman PPM dari Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Management, Jakarta.*

"Mismanagement" adalah sebuah istilah yang menikmati ketenaran cukup besar di negara kita. Terlebih lagi dengan terbetiknya sentilan berulang kali bahwa sanya bangsa Indonesia menderita kelemahan dalam management sehingga belum mampu menjalankannya dengan baik. Konon, kelemahan management adalah satu dalih pula untuk membenaran masuknya modal asing, sebab bersamaan dengan derasnya aliran uang diharapkan berlangsung juga perpindahan keahlian mengelola kepada bangsa kita.



## LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAGEMENT

Management, atau pengelolaan, melekat pada setiap himpunan manusia yang digerakkan kearah suatu tujuan tertentu yang harus dicapai bersama. Dengan kata lain, dengan berorganisasi. Jadi sebenarnya tidak terbatas kepada dunia usaha semata-mata, melainkan setiap bentuk organisasi, walaupun tentunya organisasi yang bergerak dalam bidang usaha akan langsung merasakan akibat salah pengelolaan dalam bentuk kerugian materiil. Sudah begitu banyak perusahaan yang terpaksa mengakhiri hayatnya karena sebab inilah.

Mismanagement dapat terjadi dalam urusan kepegawaian, sehingga suatu perusahaan mengalami penyakit menahun tidak dapat membuat karyawannya betah bekerja lebih lama dari dua tahun. Bisa juga terjadi pengaturan keuangan yang acak-acakan, atau terjadi kemacetan dalam usaha memasarkan hasil produksi atau jasa yang dijual. Maka dikenal berbagai istilah, seperti general management, personnel management, financial management, production management, marketing management, dan lain-lain, yang menyangkut segi-segi usaha dalam menjalan-

kan tujuan organisasi pencari laba secara berdaya-guna.

Didorong oleh kerinduan akan penyelenggaraan management yang baik di Indonesia, maka beberapa tokoh bersepakat mendirikan suatu lembaga pendidikan untuk tujuan itu, setelah berhasil diyakinkan oleh Dr. A.M. Kadarman dan Mr. F. Hendriksz (sekarang aktif di Institute for Social Studies di Den Haag) bahwa hal tersebut mutlak perlu. Tokoh-tokoh tadi antara lain Dr. A.M. Tambunan SH. (alm.), Dr. Awaluddin Djamin, Julius Tahija, Prof. Dr. Sumantri Hardjoprakoso, A. Lubis, Dr. Radius Prawiro, I.J. Kasimo, Letjen Dr. T.B. Simatupang, membentuk Yayasan PPM pada tanggal 21 Juli 1967, dengan kegiatan pertama penyelenggaraan Perguruan Tinggi Management (PTM) mulai 1 Februari 1968. Kemudian pada awal 1970 PTM berkembang menjadi Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Management.

Management yang hendak dikembangkan oleh LPPM tidak dibatasi pada perusahaan industri dan dagang, melainkan juga untuk jenis-jenis organisasi lain yang membutuhkan management yang baik, se-

perti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan sebagainya. Lembaga mendambakan terbentuknya manager dalam pengertian "men who get things done with and through other people". Manager yang hendak dididiknya adalah pemimpin perusahaan atau organisasi (atau bagian) yang lebih besar, yang harus diartikan sebagai suatu sistim yang terdiri atas subsistim-subsistim yang dipimpin oleh manager bawahan. Dengan demikian, definisi manager yang dipakai LPPM adalah "men who get things done through sub-systems with their subordinate managers."

Sejak tanggal 1 Juni 1972, LPPM menempati gedung BINA MANAGEMENT yang baru siap dibangun di Jl. Menteng Raya 9, Jakarta. Gedung ini terdiri atas 4 lantai, dengan menyediakan 10 ruangan untuk keperluan training, ruangan perpustakaan, kafeteria untuk makan siang, fasilitas penginapan untuk 20-25 trainees, dan lain-lain. Untuk sementara sebagian dari Lantai I dan II disewakan untuk kantor.

Selain training dan consultancy, Yayasan PPM juga memberikan jasa kepada perusahaan2 guna mendapatkan calon2 manager dengan melalui seleksi. Untuk ini ditempuh cara :

1. Testing tertulis dan wawancara psikologis. Sebelum pemeriksaan diadakan maka harus jelas betul mengenai per-

#### METODA YANG DIPAKAI

Karena management adalah suatu ketrampilan praktis, maka metoda training sebaiknya praktis juga. Sifat praktis itu diadakan dengan empat jalan :

- 1) **Case and incident method,** yaitu membawa kejadian dalam perusahaan ke dalam kelas.
- 2) **Simulasi,** yaitu diciptakannya suasana training yang sedapat mungkin meniru dan mendekati realitas perusahaan. Untuk itu dipakai case and incident method, latihan-latihan, role-playing, business games, dan in-basket exercises. Mengajar (lecturing) dibatasi sampai 40% dari seluruh waktu training.
- 3) **Partisipasi**  
Peserta-peserta pada umumnya sudah berpengalaman dan kadang-kadang mengetahui praktek perusahaan lebih baik daripada instruktur kursus. Oleh karena setiap fase kursus diikuti dengan diskusi antara peserta dengan instruktur, maka bekal yang dibawa oleh mereka masing-masing berguna untuk semua peserta.
- 4) **Follow-up**  
Peserta kursus melaporkan dan mengadakan analisa dari suatu problema dalam perusahaannya, serta merupakan usul-usul kearah perbaikan. Bahan ini dirundingkan dan diperbaiki oleh peserta lain bersama-sama instruktur. Peserta dianjurkan untuk menerapkan usul-usulnya dalam praktek perusahaan.





*Latihan quality control dalam Production Management Workshop LPPM.*

- syarat calon yang diminta oleh perusahaan, sehingga pemeriksaan dapat diarahkan untuk menilai apakah calon memenuhi syarat yang diminta untuk tugasnya itu.
2. Atas permintaan perusahaan diadakan juga pemeriksaan khusus untuk keahliannya dalam bidang pekerjaan itu. Pemeriksaan ini dilakukan oleh staf ahli dalam bidang-bidang tersebut.

Pembangunan gedung BINA MANAGEMENT serta fasilitas2 lain dimungkinkan oleh bantuan dari sponsor2, yaitu antara lain Perhimpunan Aloysius Semarang, Yayasan Purba Danarta Semarang, Development Aid Agency "Misereor", Aachen, Jerman; pemerintah Belanda, Konrad

Adenauer Stiftung, Jerman; dan yayasan dana bantuan ECLOF dari JENEWA, Swiss. Khususnya untuk pembangunan gedung baru di atas, bantuan diperoleh dari pemerintah Belanda, Misereor, dan ECLOF.

Bantuan keahlian serta program peningkatan pengetahuan anggota staf LPPM disediakan oleh International University Contact for Management Education Rotterdam, Asia Foundation San Francisco, Ford Foundation New York, dan USAID. Yang disebutkan terakhir ini mensponsori pengiriman anggota staf untuk advanced training ke Manila dan Amerika Serikat. ❄



*Bersambung ke hal. 44*

\* \* \*

*Pemandangan waktu seminar joint venture oleh LPPM tanggal 2-4 Agustus, dengan pembicara al. Prof. Dr. Sadli I. A.R. Suhud, Prof. Louis Wells (Harvard Advisory Group BAPPENAS), dan J.P. Bourdrez (UNIDO). (Foto: Humas LPPM).*

\* \* \*

# Kebijaksanaan Preferensi MEE dalam rangka Unctad

Artikel ini aslinya dimuat di dalam majalah EUROPA ARCHIV No. 4 tahun ke-27, 25 Februari 1972, terbitan "Deutsche Gesellschaft fuer auswaertige Politik" di Bonn, dengan judul "Die Praeferenzpolitik der EWG im Rahmen der UNCTAD". Kami terjemahkan di sini sebagai bahan pembandingan dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan Indonesia yang sedang meningkat dengan MEE pada saat ini.

Karl-Heinz Grosz adalah penasehat ilmiah pada Lembaga Penelitian Politik dan Keamanan Internasional (Forschungsinstitut fur internationale Politik und Sicherheit), bagian dari Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik (Stiftung Wissenschaft und Politik), Ebenhausen bei Muenchen.

## KARL — HEINZ GROSZ

Pada tanggal 1 Juli 1971, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) memutuskan pemberian keringanan bea masuk bagi barang-barang dari negara-negara berkembang. Dengan langkah ini, bukan saja MEE memenuhi salah satu tuntutan yang sejak lama diajukan oleh negara-negara berkembang, akan tetapi juga berarti bahwa MEE menempatkan diri sebagai perintis diantara negara-negara industri dalam mengintrodukir suatu bentuk baru bantuan bagi negara-negara berkembang.

Sebulan kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1971, Jepang mengikuti jejak ini, dan Inggris serta Selandia Baru merancang hal yang sama untuk tahun 1972.

Pada prinsipnya, semua negara industri Barat di dalam UNCTAD telah menjanjikan pemberian keringanan-keringanan bea serupa, oleh karena itu negara-negara tersebut akan mengikuti jejak MEE. Dengan Amerika Serikat masalahnya menjadi lain lagi, karena di negara itu kebijaksanaan preferensi menjadi urusan Congress. Di Amerika Serikat, dan terutama di dalam lembaga legislatifnya, arus proteksionisme dewasa ini kuat sekali, yang jelas sekali dalam program ekonomi darurat pemerintah Nixon tanggal 15 Agustus 1971. Dengan latar belakang demikian, sangat disangsikan apakah Amerika Serikat akan mengundang suatu sistem preferensi seperti telah dilakukan oleh MEE dan Jepang, di dalam tahun 1972, suatu tahun pemilihan umum.

## ISI TAWARAN PREFERENSI MEE.

Unsur-unsur terpenting preferensi tersebut ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

Negara-negara berkembang pada dasarnya memperoleh pembebasan bea masuk segera atas semua barang pabrik dan setengah pabrik, tanpa perkecualian. Namun untuk ini ditetapkan suatu plafond tertentu, yang didasarkan atas angka-angka statistik tahun 1968, dan diperhitungkan dengan rumus "impor dari negara-negara berkembang + 5% dari impor lainnya."

Dengan cara perhitungan ini, tawaran preferensi MEE memberikan kemungkinan impor bebas bea masuk dengan nilai 1030 juta dollar, karena dalam tahun 1968 negara-negara berkembang telah mengapalkan barang-barang pabrik kepada MEE sejumlah \$ 490 juta, sedangkan tambahan 5% dari impor lainnya mencakup volume impor sebesar \$ 540 juta.

Atas dasar beberapa pertimbangan, maka arus barang ini secara geografis dibedakan atas dua jurusan. Pada pihak peng-eksport, jadi negara-negara berkembang, satu negara tersendiri pada dasarnya tidak diperkenankan memanfaatkan lebih dari 50% dari plafond preferensi, untuk beberapa produk tertentu angka ini bahkan lebih rendah lagi. Langkah ini terutama menyediakan ruang gerak bagi impor bebas bea masuk dari negara-negara berkembang yang selama ini kecil eks-

porinya ke negara-negara MEE, sedangkan negara-negara pengekspor dari Asia yang selama ini dominan, dengan demikian sedikit banyak dirugikan.

Pada pihak pengimpor, Dewan Menteri MEE telah mencapai kesepakatan pembagian prosentase barang-barang yang dimasukkan ke dalam masing-masing negara anggota. Dengan pembagian ini dihindari terjadinya gangguan-gangguan di dalam pasaran lokal yang akan menyusahkan produsen-produsen setempat, akibat penumpukan barang dari negara-negara berkembang. Sebagai pedoman diambil GNP dan jumlah penduduk masing-masing, serta perdagangan dengan negara-negara ketiga, sehingga tercapai pembagian sebagai berikut: Republik Federasi Jerman 37,5%, Perancis 27,4%, Italia 20%, sedangkan negara-negara Benelux 15,1 dari volume barang yang dimasukkan ke dalam MEE.

Pengawasan atas pemasukan barang ini dijalankan dengan intensitas berbeda-beda, karena bahaya gangguan pasaran karena saingan dari "Dunia Ketiga" untuk masing-masing kelompok barang tidak sama. Oleh karena itu, Dewan Menteri telah membagi impor barang-barang pabrik kedalam tiga kelompok barang dengan kriteria yang berlandaskan tingkat kepekaan produsen Eropa terhadap persaingan dengan negara-negara berkembang.

Diantara impor barang-barang pabrik dari negara-negara berkembang dalam tahun 1968 yang bernilai \$ 490 juta tersebut, 60% termasuk golongan barang "peka". Dimasa mendatang impor barang-barang demikian akan diawasi secara ketat, dalam penyebaran maupun jumlah keseluruhannya. Barang-barang peka yang terpenting adalah tekstil, pecah belah, transistor yang sudah terpasang, hasil-hasil minyak mineral, dan kayu untuk meubelair. Yang terakhir ini dengan pertimbangan kepentingan negara-negara Afrika yang menjadi penyerta (associate member) MEE. Sisa yang 40% dibagi ke dalam 15% barang-barang setengah peka, yang hanya akan diawasi melalui angka-angka statistik setempat, dan 25% barang-barang tidak peka, yang praktis bisa masuk ke dalam MEE tanpa pengawasan.

Dengan tindakan-tindakan ini, 91 negara berkembang anggota UNCTAD, yang sebagai "kelompok 77" di dalam organisasi tersebut telah lama menuntut preferensi, akan memperoleh keuntungan. Belum pasti adalah apakah negara-negara bukan anggota kelompok tersebut (seperti Taiwan, Kuba, dan Israel, begitu juga hal-

nya negara-negara Eropa yang tergolong "sedang berkembang", yaitu Spanyol, Portugal, Turki, Yunani dan Malta) juga akan diberi kesempatan memanfaatkan kebijaksanaan preferensi ini.

#### ARTI EKONOMIS SISTEM PREFERENSI MEE.

Titik pusat sistem preferensi MEE, ditinjau dari segi ekonomi, adalah ikhtiar untuk menempatkan hubungan ekonomi antara negara-negara MEE yang sudah mencapai perkembangan dalam taraf tinggi dengan negara-negara berkembang secara keseluruhan, atas suatu landasan yang baru. Perubahan demikian adalah wajib, guna memberikan peluang kepada negara-negara berkembang untuk memperluas perdagangan luar negeri mereka, hal mana merupakan prasyarat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi negara-negara itu.

Diwaktu-waktu lampau, suatu jurang perdagangan yang merugikan negara-negara berkembang telah terbuka. Pada tahun 1964, selaku Sekretaris UNCTAD Raul Prebisch telah mengkonstatir bahwa pertumbuhan GNP sebesar 5% pertahun adalah batas minimum untuk menjaga kestabilan hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Pertumbuhan sebesar itu, menurut Prebisch, menuntut kenaikan impor oleh negara-negara industri sebesar 6% tahun. Kenyataannya, impor tersebut dalam dasawarsa 50-an naik hanya sekitar 4%/tahun, dan dalam dasawarsa 60-an malahan merosot sampai 2% sebagai akibat dari turunnya harga bahan-bahan mentah. Dengan demikian, sampai awal 70-an telah tercipta defisit neraca perdagangan di pihak negara-negara berkembang sebesar \$ 20 milyar, serta hutang sekitar \$ 60 milyar.

Seperti ditunjukkan di dalam tabel di bawah, negara-negara berkembang mengalami persoalan ini dalam derajat yang berbeda-beda.

Dalam statistik perdagangan luar negeri negara-negara industri ini, nilainya di hitung dengan mengambil titik-tolak batas-batas geografis negara-negara anggota OECD (ekspor fob, impor cif). Jadi sebenarnya untuk negara-negara berkembang harus diadakan penyesuaian dalam perhitungannya. Penyesuaian perhitungan ini akan lebih memburukkan lagi neraca bagi negara-negara berkembang.

Tabel menunjukkan bahwa situasi adalah paling gawat bagi negara-negara berkembang di Asia, yang neraca perdagangannya terhadap semua negara industri sejak bertahun-tahun negatif dan senantiasa menjadi lebih parah.

Negara-negara Amerika latin memang telah dapat memperbaiki neraca perdagangannya dengan MEE dan Jepang, namun harus menerima defisit lebih besar

kangan ekonominya dan perbandingan yang relatif seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk.

Namun dengan perkembangan lebih jauh, Afrika pada mulanya mungkin akan mengalami situasi yang parah seperti dijalani oleh Amerika Latin dalam sepuluh tahun terakhir, sebab dengan perkemba-

**PERKEMBANGAN SALDO NERACA PERDAGANGAN KELOMPOK  
NEGARA BERKEMBANG \***

(dalam jutaan US \$)

	MEE		USA		JEPANG		OECD (1)	
	1961	1970	1961	1970	1961	1970	1961	1970
Asia **	- 22,0	- 30,4	- 29,2	- 48,2	- 17,8	- 135,0	- 87,7	- 348,2
Amerika Latin	+ 3,0	+ 36,0	0	- 58,0	+ 11,8	+ 21,4	+ 57,5	+ 28,5
Afrika	+ 2,7	+ 204,6	- 11,5	- 14,4	- 18,6	- 26,6	- 29,5	+ 233,4

\* Diperhitungkan dari Statistik OECD

\*\* Yang termasuk Asia menurut Statistik OECD sekarang adalah negara-negara sebelah Timur dari Pakistan, termasuk Pakistan sendiri. Dalam angka-angka untuk tahun 1961 tidak ada perhitungan dari Taiwan.

lagi terhadap Amerika Serikat, penyedia tradisional barang-barang di kawasan itu. Surplus dengan OECD terlampau kecil untuk mengimbangi anggaran sektor pemerintah, sehingga negara-negara Amerika latin juga sudah mulai menderita akibat jurang perdagangan ini.

Yang paling mujur adalah Afrika, karena di sini tiga faktor bertemu dan bekerjasama. Pertama, dalam sepuluh tahun belakangan ini negara-negara tersebut berhasil memperluas ekspor bahan mentahnya (minyak bumi dan bahan-bahan mineral). Kedua, berkat perjanjian-perjanjian khusus dengan bekas-bekas penjajah di Eropa, banyak diantara negara-negara Afrika berhasil mengumpulkan surplus perdagangan dalam jumlah besar. Ketiga, kebutuhan impor negara-negara ini belum begitu besar seperti di benua-benua lain, disebabkan oleh keterbela-

ngan ekonomi kebutuhan impor menajak pula, sedangkan bersamaan dengan itu ke naikan ekspor tradisional hanya bisa berlangsung perlahan-lahan.

Selama ini telah diusahakan untuk menutup defisit neraca perdagangan ini dengan jalan memberikan bantuan modal, yang diharapkan akan mempercepat tumbuhnya produk industri. Akan tetapi strategi ini belum memperoleh hasil seperti diharapkan, karena pertumbuhan yang di capai tidak memadai. Tambahan pula bantuan modal yang diberikan dalam bentuk kredit sementara itu telah berakumulasi membentuk tumpukan hutang, hal mana bagi beberapa negara merupakan beban yang sangat menekan, maka akibat jangka panjang bantuan dalam bentuk ini lebih cenderung bersifat negatif (2).

Dilemma menyolok yang diderita negara-negara berkembang ini, dalam persoalan mana negara-negara industri de-

(1) Negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) adalah Amerika Serikat, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Eslandia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Kanada, Luxemburg, Norwegia, Perancis, Portugal, Spanyol Swedia, Swiss, Turki, dan Yunani.  
OECD didirikan pada tahun 1961 untuk mengatur kerjasama dikalangan anggotanya dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pembangkitan tenaga dan pengangkutan. Organisasi ini merupakan pertumbuhan lebih lanjut dari OEEC (Organization for European Economic Cooperation), yang didirikan pada tahun 1948, dan pada mulanya berfungsi sebagai badan koordinasi perencanaan ekonomi negara-negara Eropa yang menerima bantuan Amerika

ngan politik perdagangannya turut bersalah, akan diikhtiarkan penanggulangannya dengan sistim preferensi, seraya merangsang ekspor barang-barang jadi dari negara-negara berkembang.

Selama ini ekspor barang-barang jadi di hambat, dan kadang-kadang untuk sebagian tidak dimungkinkan samasekali oleh sistim bea cukai negara-negara industri. Semua negara industri mengenakan bea sebesar suatu prosentase tertentu dari nilai barang. Selain itu, khas juga pada sistim bea cukai ini, bahwa pada umumnya bahan-bahan mentah dibebaskan dari bea masuk, sehingga memiliki daya saing dalam forum internasional sekalipun, sebaliknya produk-produk jadi yang berasal dari bahan-bahan tadi dikenai bea.

Effek sistim ini adalah: Sang produsen Eropa memperoleh bahan-bahan mentah ini bebas bea, kemudian memberikan nilai tambah. Seandainya produsen di negara berkembang mengerjakan hal yang sama pula, kemudian mengekspornya, maka ia harus membayar bea atas nilai keseluruhan produk tersebut, jadi termasuk pada nilai bahan mentahnya. Karena biasanya bea ini tidak dapat dibebankan kepada pembeli, maka pengolahan bahan mentahnya sendiri memperkecil keuntungan dari ekspor negara-negara berkembang. Effek ini nampak bahkan pada pengenaan bea yang secara nominal relatif rendah sekalipun.

Hal demikian sebagian mempunyai efek penghalang, akan tetapi yang pasti adalah, bahwa penghasilan ekspor negara negara berkembang sangat diperkecil, dan bersifat diskriminatif terhadap mereka. Penurunan bea masuk yang diputuskan di dalam Kennedy Round, begitu pula upaya-upaya serupa di-masa lampau dalam rangka GATT untuk menghalaukan diskriminasi ini tidak mencapai hasil.

Sistim preferensi yang dipelopori oleh MEE pada tanggal 1 Juli 1971, merupakan usaha yang berhati-hati guna meniadakan diskriminasi ini, dan memberikan peluang yang pada dasarnya seimbang dengan negara2 industri kepada negara-negara berkembang dalam bidang ekspor. Dengan begitu, maka negara-negara berkembang diharapkan mendapat kesem-

patan untuk memperluas dan menstabilkan ekspor barang-barang jadi dan setengah jadi, yang tidak dihadapkan kepada ke-goncangan2 harga seperti halnya bahan-bahan mentah, sehingga jurang perdagangan ini bisa ditutup.

Bersamaan dengan itu, dapat dikembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, sambil sekaligus mengurangi pengangguran, karena peralihan dari ekspor bahan mentah kepada hasil produksi yang dimasa depan juga membutuhkan bantuan modal negara-negara industri. Perdagangan luar negeri dengan demikian dapat merupakan faktor pencipta kesempatan kerja baru pula.

Dengan uraian di atas, telah digambarkan secara garis besar arti ekonomis yg. bisa dipunyai oleh pemberian preferensi yang berdaya guna secara tetap kepada ekspor negara-negara berkembang. Karenanya, sistim yang diberlakukan oleh MEE sejak 1 Juli 1971 bermakna penting sebagai suatu precedent, dengan segala kelemahan birokratisnya sekalipun.

Namun tidak boleh lepas dari perhatian kita, bahwa kelanjutan konsekwen kebijaksanaan yang ditempuh MEE ini, meskipun tidak nampak tanda-tandanya bahwa akan diikuti oleh Amerika Serikat dalam tempo dekat ini, akan memaksakan penyesuaian diri pada industri Eropa, dengan melibatkan ketegangan2 dan pengorbanan-pengorbanan tertentu. Maka dari itu kebijaksanaan preferensi jangka panjang hanya bisa terlaksana bila dilandasi oleh suatu kebijaksanaan struktural yang menyeluruh bagi Eropa. Dalam makna demikian, secara tepat Komisi MEE mengemukakan hubungan antara kedua permasalahan ini didalam Memorandum tentang kebijaksanaan sektor tekstil.

Revisi yang akan dijalankan oleh MEE terhadap preferensi bea pada pertengahan tahun 1972, harus berkiblat kepada arti sentral sistim preferensi bagi integrasi negara2 berkembang kedalam perekonomian dunia. Bila integrasi ini gagal, maka tiada pilihan lain kecuali suatu kemungkinan yang dubieus untuk menjalankan suatu strategis pembangunan yang autarkis, seperti misalnya dilakukan oleh RRC dengan pengorbanan besar dan tidak

(2) Contoh nyata adalah Pakistan. Walaupun negara ini memperoleh penangguhan pembayaran kembali ada yang sampai pertengahan tahun 1973, beban hutang luar negeri telah memusingkan para perencana negara tersebut. Pakistan telah menerima lebih dari US \$ 7.100 juta sejak tahun 1950. Pada tahun 1971, negara ini menerima pinjaman US \$ 386 juta dan mengeluarkan US \$ 131 juta untuk pembayaran hutang2 terdahulu, setelah memperoleh penangguhan pembayaran kembali atas US \$ 100 juta lagi, yang seharusnya juga harus dibayarkan tahun lalu. (REDAKSI)

sepenuhnya dilakukan dengan rela. Jurang antara Utara dengan Selatan dengan begitu akan makin mendalam serta membawa akibat2 politis lebih lanjut.

#### **Beberapa aspek politis preferensi MEE.**

Dibangunnya suatu sistim preferensi umum sebagai suatu langkah ekonomis semata-mata saja sudah memiliki bobot politik dalam hubungannya dengan masalah Utara-Selatan ini. Diluar itu muncul juga beberapa persoalan politik nyata, tiga diantaranya akan diketengahkan di sini: Penyerasian antara kebijaksanaan MEE terhadap anggota-anggota penyerta di Afrika dengan sistim preferensi umum, dualisme antara GATT dengan UNCTAD, dan arti MEE yang semakin penting bagi Dunia Ketiga.

Sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani di Jaunde dan Arusha mengenai keanggotaan penyerta, sejak beberapa waktu MEE telah memberikan preferensi kepada ekspor ke dalam Pasaran Bersama Eropa dari 17 negara Afrika dan ketiga negara Afrika Timur, yaitu Kenya, Tanzania dan Uganda. Efek ekonomis dari hubungan istimewa ini dirasakan sebagai suatu diskriminasi oleh negara2 berkembang di Asia dan Amerika latin, karena mereka harus bersaing di dalam pasaran MEE dengan negara2 Afrika yang memperoleh perlakuan khusus tersebut. Oleh karena itu ketentuan tentang keanggotaan penyerta ini diwaktu-waktu yang lalu berulang kali diserang dan dikedam.

Diberikannya preferensi umum menumpulkan masalah ini, tanpa menghapuskannya secara yuridis, karena seperti sebelumnya anggota-anggota penyerta secara teoretis memperoleh kesempatan lebih besar daripada negara-negara lain. Namun masalah2 pelik tidak akan timbul lagi dalam hubungan antara MEE dengan Dunia Ketiga, karena sebagian besar (14 diantara 20) anggota penyerta tadi, berdasarkan ketentuan PBB termasuk kedalam golongan "yang termiskin diantara yang miskin". Untuk negara2 ini, PBB telah menyarankan diambilnya langkah-langkah istimewa, dan keanggotaan penyerta mudah diberikan justifikasinya sebagai bagian program istimewa tadi.

Problema kedua tumbuh dari dualisme materiil maupun formil antara prinsip perlakuan umum GATT di satu pihak, dengan prinsip preferensi sepihak UNCTAD di pihak lain. Segi materiil dualisme ini

tidak begitu banyak persoalannya, karena GATT sejak lama melibatkan diri ke dalam masalah2 negara2 berkembang, dan membenarkan pemberian hak-hak istimewa kepada negara2 demikian. Penyimpangan dari prinsip perlakuan umum dalam hal hubungan Utara-Selatan oleh karenanya berlangsung dengan persetujuan GATT, sebab diharapkan terwujudnya dalam kenyataan pemikiran2 dasar "perseimbangan tanpa diskriminasi" di dalam hubungan ekonomi dunia. Sebelum ini, perbedaan ekonomis antara negara2 berkembang dengan negara2 yang sudah maju mencegah suatu keseimbangan nyata dalam hubungan-hubungan perekonomian yang diatur berdasarkan prinsip perlakuan umum. Secara materiil dengan demikian ada alasan untuk berbicara tentang bisa dipertemukannya prinsip perlakuan umum dengan perlakuan sepihak terhadap negara2 berkembang, sejauh diambil titik-tolak bahwa perlakuan khusus bagi negara2 tersebut bisa mempercepat pertumbuhan mereka, sehingga setelah suatu jangka waktu tertentu dapat mengambil bagian dalam perdagangan dunia dengan kedudukan sederajat.

Akan, tetapi secara institusionil tetap ada suatu pertentangan: Atas desakan negara-negara berkembang di dalam bingkai PBB didirikan suatu organisasi global yang khusus untuk memperjuangkan kepentingan2 mereka. Sekalipun sebagian besar negara berkembang sudah menjadi anggota GATT, di dalam wujud UNCTAD terciptalah suatu organisasi perdagangan internasional yang kedua. Ini berlawanan, atau paling tidak ada pertentangan kepentingan dengan GATT. Bagi MEE sebagai partner internasional yang baru dengan demikian tersedia kesempatan untuk memainkan peran dalam bidang ekonomi dan politik dengan mengadakan kaitan dengan suatu organisasi yang menjadi bagian PBB. Namun kebijaksanaan semacam itu mempertinggi bahaya terjadinya konfrontasi dengan Amerika Serikat, hal mana secara politis tidak diharapkan. Atas dasar itu, Komisi MEE telah mengusahakan menjaga keseimbangan antara aktivitasnya di dalam UNCTAD dengan bekerjasamanya di dalam GATT.

Sekalipun demikian, kenyataannya tetap adalah bahwa MEE dengan memberikan preferensi di dalam UNCTAD telah melibatkan diri lebih jauh dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang da-

*Bersambung ke hal 43*

# EKONOMI

## SINGKAT

\* Presiden dari Komisi Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC), Sicco Mansholt, menyerukan kepada negara2 yang sedang berkembang untuk mengekspor lebih banyak barang2 jadi daripada bahan2 mentah kepada Masyarakat Ekonomi Eropa.

Selama ini negara2 sedang berkembang mengekspor sejumlah besar bahan2 mentah, demikian dikatakan nya. Negara2 EEC yang tahun depan akan bertambah dengan masuknya Inggris, Denmark dan Irlandia, akan memberikan perlakuan preferensi kepada barang2 jadi dari negara2 berkembang. Dikatakan oleh Mansholt, bahwa EEC yang diperbesar akan meningkatkan impor barang2 jadi dari negara2 berkembang sebesar 15%. (BEK)

\*\*

\* Daerah Cibinong yang oleh Pemda Jawa Barat direncanakan akan dijadikan industrial estate, adalah kurang baik jika dibandingkan dengan daerah Bekasi untuk rencana yang serupa. Penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Bandung menunjukkan bahwa daerah Cibinong mempunyai potensi cadangan air yang sangat minim. Hasil pemompaan air dari dalam tanah hanya mampu mengeluarkan air 35 liter/detik, sehingga kalau daerah ini akan dijadikan proyek industri yang banyak menggunakan potensi air, seperti misalnya industri tekstil, adalah sangat mengkhawatirkan, demikian seorang pejabat Seksi Hidrogeologi Direktorat Geologi Bandung.

Dikatakannya juga bahwa selain potensinya kurang, juga hasil penyelidikan menunjukkan bahwa air yang keluar dari dalam tanah Cibinong banyak mengandung kadar besi dan mangan. Air semacam ini kalau mau digunakan untuk keperluan industri perlu diolah dahulu secara mekanis.

Membandingkan dengan daerah Bekasi yang juga oleh Pemda Jabar akan dijadikan industrial estate, pejabat Direktorat Geologi tersebut mengatakan, bahwa Bekasi adalah lebih ideal, mengingat potensi air tidak hanya menggantungkan dari pengeboran, tapi lebih banyak dari saluran air waduk Jatiluhur. Menurut rencana, Cibinong akan menjadi tempat di mana akan didirikan 300 proyek industri. (EKONOMI INDONESIA)

\* Kabinet Jepang memutuskan untuk meminta persetujuan Parlemen mengenai peraturan penurunan bea masuk atas 1865 macam barang, yang akan segera berlaku setelah disahkan.

Dalam peraturan yang dimajukan, sebanyak 162 macam barang dikecualikan dari penurunan bea masuk itu, untuk melindungi industri dalam negeri. Sebelumnya, Jepang telah mengeluarkan peraturan tentang dibebaskannya 395 macam barang impor dari bea masuk.

Peraturan penurunan bea masuk ini, yang merupakan bagian dari usaha Jepang untuk mencegah revaluasi atas mata uang yen, telah diserahkan kepada sidang istimewa Parlemen tanggal 27 Oktober. Jika-lau peraturan ini diterima, rata2 bea masuk Jepang akan turun dari 5,9% dewasa ini menjadi 5,3%. Rata2 bea masuk yang berlaku di Inggris dewasa ini adalah 6,9%, dan di negara2 Eropah lainnya 3,9%.

Di bidang impor barang2 hasil industri, penurunan itu akan sekitar 1,5% dari 10% dewasa ini menjadi 8,5%. Yang berlaku di Eropa adalah 8%, sedangkan di Inggris 8,2%. (KOMPAS)

\*\*

Kelompok industri raksasa MITSUI dari Jepang sedang merencanakan perluasan kegiatan di Singapura. Melalui salah satu anak-perusahaannya, MITSUI TOMATSU CHEMICALS, kelompok ini baru saja menyelesaikan pabrik pupuk seharga US \$ 2,12 juta, yang meliputi luas 16.530 m2 di Jurong Port. Hasilnya akan dipasarkan ke India, Malaysia, dan Indonesia.

Perusahaan tersebut juga telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah di Jurong Town guna pendirian suatu kompleks industri kimia (ABI)

\*\*

\* Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan se-kurangnya akan seimbang dengan pertumbuhan tahun ini, dan mungkin melampaui 6—7% perambahan nyata selama empat tahun terakhir, demikian menurut penerbitan Chase Manhattan Bank, International Finance.

Output minyak bumi, yang berkisar sekitar 900.000 barrel per hari tahun lalu, dalam tahun ini diperkirakan akan meningkat dengan 35%, sehingga mencapai 1,2 juta barrel per hari. Penghasilan bersih dari minyak bumi dalam tahun 1973 akan lebih dari US \$ 400 juta, lebih dari dua kali lipat penghasilan tahun lalu.

Kemajuan lebih jauh dalam meningkatkan produksi beras dan hasil2 pertanian lainnya akan mempertahankan kecenderungan peningkatan sektor ini, yang sudah nyata sejak tahun 1967, dan akan menjaga agar harga bahan makanan akan tetap rendah. Menurut International Finance selanjutnya, kembalinya permintaan dunia akan timah akan mendorong output penambangan mineral, sedangkan permintaan domestik yang meningkat akan melanjutkan dorongan terhadap pertumbuhan industri barang2 konsumsi. (BEK)

\* MEIJI MILK PRODUCT & CO. baru2 ini mendirikan sebuah perusahaan joint venture yang menghasilkan susu steril bersama dengan perusahaan terkemuka setempat di daerah Bandung.

Menurut MEIJI, perusahaan susu dan hasil2 susu Jepang yang diberi nama PT HARAPAN INSANI MILK PRODUCTS, INDONESIA telah diresmikan dengan modal yang disetorkan \$ 500.000. Perusahaan tersebut dimiliki 60% oleh MEIJI dan 40% oleh PT. HARAPAN INSANI dari pihak Indonesia. Diharapkan perusahaan joint venture yang mendasar kerjasama sepenuhnya dari persatuan pemerah2 susu setempat itu, akan mulai berproduksi pada permulaan tahun depan untuk melayani daerah Bandung. Usaha MEIJI, yang mencerminkan usaha sejenis yang jarang bagi industri susu Jepang, bisa disusul oleh perusahaan2 joint venture Jepang yang serupa lainnya di daerah Asia Tenggara. (WARTA EKONOMI JEPANG).

\* \* \*

\* Sebuah pabrik Esbestosemen yang telah memiliki ciri2 khas "top kweliteit" satu2nya dari luar negeri, yaitu pabrik esbestosemen "ETERNIT", produksi patent Belgia akan dibangun di Gresik dengan lokasi di Desa Indro (Kecamatan Kebomas/ Kabupaten Surabaya).

Pabrik ini dibangun atas usaha joint venture antara PT Semen Gresik dengan Belgia, dengan penanaman modal pertama kl. US \$ 1,5 juta dan bila perlu ditingkatkan sampai sejumlah US \$ 4 juta.

Direktur Pabrik esbestosemen patent Belgia "Eternit", Heru Juwono, selanjutnya mengatakan bahwa pabrik ini diperkirakan akan mulai berproduksi bulan Mei 1973. (S.H.)

\* \* \*

\* Spanyol sedang membina hubungan dagang yang lebih erat dengan negara2 Arab. Perusahaan minyak Spanyol, Hispanoil, menguasai 49% dari seluruh saham Kuwait—Spanish Petroleum Co, yang memiliki dua sumur yang berproduksi di Kuwait, dan ada tanda2 bahwa galangan2 kapal Spanyol akan membuat sejumlah kapal tanki untuk negara di Teluk Persia tersebut.

Di Kairo, perusahaan mobil Spanyol, Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) dari Madrid, sedang merampungkan partnership dengan Pemerintah Mesir guna mendirikan suatu pabrik assembling truk heavy-duty di Kairo atau Iskandariah, seharga \$ 38 juta. Pabrik ini akan mulai berproduksi tahun 1976, dengan menghasilkan 8000 kendaraan setahun, sebagian besar model Pegaso. (NEWSWEEK).

\* \* \*

\* Pabrik terpal PT INDUSIND CO. LTD. di awal bulan Oktober telah dimulai pembangunannya. Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut merencanakan modal Rp 600 juta dan diharapkan akan mulai dengan produksi percobaan pada bulan Oktober 1973, sedangkan produksi komersial direncanakan Januari 1974, yang akan menghasilkan 1.200.000 meter per tahun sehingga akan menghemat devisa sebesar kurang lebih US \$ 1 juta per tahun.

Menurut direktur utama PT. INDUSIND, M.A. Gayo, pabrik terpal tersebut akan memproduksi terpal no. 8 yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, yang tiap tahun membutuhkan 17.000.000 meter, dan selama ini harus diimport. (S.H.)

\* Perusahaan Jepang, NISHIO IWAI CO., KOBAYASHI SEIKO—JO, dan MARUICHI KOOKAN bekerjasama dengan perusahaan Indonesia RESPATI JAYA, sedang mendirikan sebuah pabrik pipa baja di Semarang atas dasar joint venture.

Perusahaan joint venture yang akan diberi nama PT INDONESIA STEEL TUBE WORKS, menggunakan modal pertama sebesar 360 juta yen, dengan saham2nya dimiliki oleh Niishi Iwai 60%, Kobayashi Maruichi masing2 10%, dan Respati Jaya 20%. Pada tahap pertama pabrik tersebut akan menghasilkan 1.500 ton pipa baja ukuran kecil yang lazim digunakan untuk pipa air dan gas. Menurut rencana akan mulai beroperasi pertengahan Oktober 1972. (S.H.)

\* \* \*

\* Managing Director LIFECOTE INTERNATIONAL LTD., C.L. Mellanion dari Selandia Baru, perusahaannya akan memproduksi decorative coating, liquid wall paper serta floor decorative color atas dasar joint venture dengan ARTAKAYA ENTERPRISE sebagai counterpart Indonesia.

Mellanion menjelaskan bahwa decorative coating untuk melapisi dinding dengan suatu bahan kimia khusus yang tahan air dan matahari, mempunyai daya tahan yang luar biasa. Demikian pula liquid wall paper untuk interior rumah2 dan gedung2 mempunyai warna beraneka ragam, sedangkan floor decorative color terdiri dari 100 macam corak.

Counterpart pihak Indonesia, Tirta Raharjo mengatakan bahwa kini sedang diadakan feasibility study mengenai kemungkinan penanaman modal dalam bidang produksi lifecote, yang bagi Indonesia merupakan hal yang baru. Setelah hasil feasibility study dari konsultan diperoleh, maka dalam waktu singkat proyek tersebut akan diajukan kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh izin membangun proyek tersebut.

Secara ekonomis pemakaian lifecote akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang serta 30% bahan bakunya bisa diperoleh di Indonesia. (S.H.)

\* \* \*

\* JEPANG pada tanggal 20 Oktober telah mensahkan program baru untuk melawan tuntutan supaya yen direvaluasi, dengan meningkatkan impor dan mengekang ekspor.

Program tsb. mencakup pengurangan bea2 impor sebanyak 20% atas barang2 industri dan barang2 pertanian yang sudah diolah, peningkatan quota 30% untuk impor barang2 terdaftar tertentu, dan memperkecil hambatan2 impor. Diputuskan juga bahwa ordonansi tentang pengawasan atas perdagangan luar negeri dihidupkan kembali dengan tujuan mengekang ekspor.

Selain itu diumumkan bahwa akan dipertimbangkan kemungkinan pengadaan pajak atau bea tambahan atas ekspor.

Sementara itu, kabinet Jepang telah meninjau kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi Jepang. Semua diperkirakan pertumbuhan itu dalam nilai riil akan meningkat 7,2% tahun fiskal ini. Kini diperkirakan pertumbuhan akan mencapai 9,5%. Pertumbuhan riil ekonomi Jepang tahun fiskal yang lalu diperkirakan 5,9%.

Menurut dugaan, ekspor Jepang tahun fiskal sekarang akan menanjak 13,1% menjadi 27.900 juta dollar sementara impor akan naik 21,3% menjadi 19.000 juta dollar. (KOMPAS)

# TOURISM BOOM

OEJENG SOEWARGANA

## THE NIGHTMARE OF TECHNOLOGY

Di semua negara sangat terasa pengaruh digunakannya mesin2 teknologi modern, yang mendesak manusia menjadi tunakarya.

Oleh satu pabrik sandal plastik, beribu tukang sandal kulit dari Gang Aleng sampai ke Bojongloa kehilangan pekerjaan. Beribu tukang kaleng mati-kutu terbunuh oleh produksi satu pabrik ember dan gayung plastik. Setelah masuk mesin2 tenun full-automatic, yang menenun tetrex trevira dan tetoron di Majalaya dari 17000 ATBM hanya tinggal 4000 yang masih bekerja. Di Rajapolah puluhan ribu tukang samak "gulung tikar" kalah oleh tikar plastik buatan pabrik. Satu pabrik dus karton Guru Indonesia membikin 56 perusahaan peti di Sukabumi terpaksa harus ditutup!

Memang ..... di mana-mana teknologi modern itu terasa luar bisa kejamnya. Pantas Gordon Ratray Taylor memberikan judul pada bukunya "THE NIGHTMARE OF TECHNOLOGY", menguraikan akibat negatif yang mengerikan dari perkembangan mesin2 teknologi modern.

## PINDAH KE BIDANG MENJUAL JASA.

Mereka yang unemployed terdesak oleh mesin2 otomatis, biasanya berusaha mencari bekal hidup dengan jalan "menjual jasa", Menyodorkan minuman & makanan, mengangkat bagasi orang, membikin bersih kamar dan ruangan, menjadi pengantar tamu, pendek kata ..... sebagian besar para tunakarya itu pindah ke bidang2 pekerjaan yang erat hubungannya dengan KEPARIWISATAAN.

Mengingat betapa ganasnya pengaruh teknologi modern, yang tidak akan dapat dihindari di negara yang sedang berkembang di manapun juga, seyogyanya bidang PARIWISATA, — yang dapat dijadikan tempat penampungan para tunakarya itu — harus mendapat perhatian sepenuhnya dari Pemerintah di Pusat maupun di Daerah.

Dewasa ini di negara2 jang telah maju, berpariwisata berkunjung ke negeri orang sudah menjadi suatu "keharusan".

Bukan untuk yang kaya saja! Semua tingkat masyarakat pada musim libur bepergian jauh-dekat meninggalkan tempat tinggalnya. Mengingat keadaan itu, dapat difahami jika ada negara yang memperkembangkan bidang tourisme sehingga menghasilkan sebagian besar dari GNP-nya. Negara SPANYOL telah berhasil untuk "MENJUAL CAHAYA MATAHARI" yang menyinari pantai2nya kepada penduduk negara2 Eropah Utara seperti: Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia, Belanda, Belgia dan Jerman-Barat, yang sangat memerlukan "panasnya matahari" itu. Pada permulaan tahun limapuluhan, Pemerintah Spanyol membeli tanah2 di pulo2 Majorca, Minorca, La Palma dsb. dan di pantai2 seperti "Costra Brava", "Costra del Sol" dsb.

Tanah2 itu kemudian oleh Pemerintah Spanyol ditawarkan kepada para investor pengusaha hotel dan travel agencies dari negara2 Eropah-Utara. Dengan cara demikianlah tourisme di Negara Spanyol dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Dewasa ini merupakan penghasilan nega

ra yang paling utama. Jika kita sekarang pada musim libur berjalan-jalan di Costa del Sol, kita disana akan mendengar lebih banyak orang yang berbicara bahasa Belanda daripada bahasa Spanyol. Tidak ada bedanya seperti di.....Amsterdam saja!

#### TOURISTS-BOOM SESUDAH 1974.

Indonesia mempunyai peluang yang luar-biasa baiknya untuk memperkembangkan pariwisata. Ny. A. Landsbury, demiki an juga komputer yang dibiayai oleh PATA, meramalkan bahwa dalam bidang tourisme Indonesia itu menghadapi masa yang gilang-gemilang. Mulai tahun 1974 Indonesia bisa mengharapkan suatu "TOURISTS-BOOM".

Ramalan mereka itu di antaranya berdasarkan pertimbangan seperti berikut :

- (1) Orang Eropah dan Amerika sudah mulai bosan melihat alam (nature) dan kebudayaan (culture) dari negara2 Eropah/Amerika, yang telah lama mereka kenal. Mereka ingin melihat "something different". Dan di Indonesia itu cukup keindahan "alam" dan "kebudayaan" yang memang "lain dari pada yang lain", yang tidak ada di lain tempat di dunia, seperti Candi2 Prambanan, Borobudur, Pura2 di Bali, Arsitektur Minangkabau, Batak, Toraja, Kerajinan dan Kesenian Rakyat di Bali, Jawa, Sunda, dsb. Pendek kata teristimewa dalam bidang Kesenian *cukup varietas dengan nilai virtuositas* yang dapat dikagumi orang.
- (2) Dibandingkan dengan lain2 negara, Indonesia termasuk negara yang politis PALING TENTERAM. Timur-Tengah yang masih bergolak, Pakistan-India yang baru saja mengahiri perangnya, Vietnam—Laos—Cambodja—Burma yang masih terlibat dalam pertikaian bersenjata, bukan daerah tujuan tourisme yang dapat memberikan ketenangan. Di Thailand Utara mulai banyak insiden dengan gerombolan bersenjata. Di Philipina Utara pasukan Komunis mulai aktif kembali.
- (3) Sesudah kapal-udara raksasa Boeing 747 mulai beroperasi tahun 1971. meledaklah perang tarif angkutan udara. Untuk mengisi kapal-udara kecil, seperti Boeing 727, DC—8, DC—9, Viscount dsb mereka mengadakan charterflights dengan biaya yang jauh lebih murah. Mulai The Caledonian British United untuk roundtrip Jakarta—Eropah memasang harga nedfl 2000.— atau setengahnya dari tarif IATA. Di Indonesia diwakili oleh "Antar Ruang" dan "East West Travel". Tahun 1971 harga itu dijatuhkan oleh Neckermann, Centouri, Era International, Inter Asia. dsb sampai nedfl 1750.— Kemudian tumbuhlah "club2" yang mengadakan charterflights yang lebih murah lagi, seperti misalnya AFFRO (Association for Friends and Family Relations Overseas). Hanya nedfl 1550 saja, atau SEPERTIGA dari tarif IATA. Untuk orang Eropah yang sebulan rata2 berpenghasilan bersih di atas nedfl 1250,— biaya nedfl. 1550,— untuk pulang—pergi ke Indonesia merupakan suatu jumlah yang mudah bisa terjangkau!
- (4) Tahun 1973 di perairan Indonesia akan mulai beroperasi kapal2 pesiar (cruise ships). Di antaranya dari HAL (Holland—America—Lines). Permulaan th 1973 HAL akan mengerahkan 2 kapal pesiar baru, yang akan berkeliling mengarungi lautan antara pulo2 di Indonesia. Dengan demikian tempat tempat terpencil yang menarik seperti Gunungsitoli, Soasiu, Dobo, Larat, Ende, Kupang dsb dapat dikunjungi para pariwisataawan, asal laut di dekat pantai itu cukup aman untuk berlabuh. Hotel tidak perlu didirikan, sebab para pengunjung bisa tidur di kapal. Tiap pulo yang tersebar di Khatulistiwa itu mempunyai keanehan flora dan fauna dan kelainan kebudayaan yang khas.
- (5) Oleh karena letak Indonesia itu di Khatulistiwa, keadaan iklim seluruh tahun hampir sama saja. Keadaan temperatur boleh dikatakan tidak ada bedanya. Hanya hujan, di musim kemarau kurang, sedang di musim hujan agak banyak. Lebih timur letak tempat keadaan cuacanya lebih kering. Mengingat iklim yang konstant itu tourisme di Indonesia tidak tergantung pada musim! Bisa "the whole year around."

## BRUSSELS TARIFF NOMENCLATURE

Ditjen Bea dan Cukai Indonesia dalam rangka penggantian Buku Lampiran A untuk penentuan klasifikasi bea masuk (Rechten Ordonantie 1934) dengan Brussels Tariff Nomenclature BTN, menerangkan bahwa Indonesia akan menggunakan BTN mulai tanggal 1 Oktober 1972. Dewasa ini sudah 130 negara yang menggunakan BTN dan meniadakan Buku Lampiran A. BTN disusun lebih sempurna dan terperinci untuk seluruh jenis barang daripada Buku Lampiran A, yang ditandatangani oleh 8 negara pada tanggal 15 Desember 1950 di Brussel dan diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Perancis. Selain itu masih ada tiga buku penjelasan yang merupakan peraturan pelengkap. Selanjutnya diberitakan pula bahwa setelah penggunaan BTN, Indonesia masih memerlukan baik laboratorium khusus Bea Cukai guna meneliti suatu bahan yang sulit dibedakan, maupun suatu Badan Penyelesaian semacam mahkamah netral guna penyelesaian bilamana ada perbedaan klasifikasi. Demikian diberitakan oleh EKONID.

Lebih lanjut KOMPAS mengabarkan bahwa penggunaan BTN diundurkan sampai 1 April 1973 yang akan datang, dan tidak mulai 1 Oktober seperti diperkirakan semula. Tanggal 1 Oktober **baru merupakan** dimulainya masa peralihan dari sistim Jenewa yang sekarang digunakan kepada sistim BTN. Dalam masa peralihan tersebut, yang akan berlangsung sampai tanggal 31 Maret 1973, masih akan digunakan sistim lama, sedangkan sistim BTN hanya dipergunakan sebagai alat checking saja. Ini dimaksudkan agar para petugas Bea Cukai dan para pengusaha yang bersangkutan dapat membiasakan diri sebelum sistim BTN benar2 dipergunakan.

## Sumbangan Buku LPPM

Perpustakaan KADIN Jabar telah menerima sumbangan dari Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Management, berupa beberapa buku yang telah diterbitkan lembaga tersebut sejauh ini, yaitu:

1. Bagaimana Memahami Neraca
2. Management — Daftar Pedoman Kerja
3. Bagaimana Menciptakan Pasar
4. Bagaimana Manager Membagi Waktu (berserta suplemen)
5. Instruksi Kerja

Buku-buku di atas berisikan petunjuk-petunjuk praktis untuk mereka yang menjalankan profesi management.

Untuk sumbangan yang sangat berharga ini KADIN Jabar mengucapkan banyak terima kasih.

## Membicarakan Ekonomi INDONESIA di CANBERRA



*Prof. Dr. Emil Salim, Menteri Negara dan Wakil Ketua BAPPENAS, sedang memberikan sambutan dalam dinner waktu seminar. (Foto: Australian Trade Commission)*

Dalam rangka mempererat hubungan dagang Indonesia dengan Australia, Australia - Indonesia Business Cooperation Committee (AIBCC) telah menyelenggarakan seminar dengan topik "To Know Indonesia" bertempat di Gedung Seminar Academy of Science di Canberra tanggal 31 Agustus dan 1 September yang lalu.

Hadir dalam seminar tersebut 140 pengusaha Australia dan k.l. 30 orang pembesar serta pengusaha Indonesia, a.l. Prof. Dr. Emil Salim, Ir. Abdul Rauf Suhud, Ketua Sub-Panitia Penanaman Modal Asing, Drs. I. Hartawan, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan, Brigjen Soegiri Soemodarsono, Dirjen Industri Ringan, Hajati Suoredjo S.H., Direktur Hukum Sipil Departemen Kehakiman, Sujitno Sukirno, Duta Besar Indonesia untuk Australia, dan E. Kowara, Ketua Indonesia - Australia Business Cooperation Committee, dan lain-lain.

Seminar telah mendengarkan pembicara-pembicara ahli mengenai penanaman modal dan perniagaan, serta membahas perkembangan ekonomi Indonesia, kebijakan sanaan investasi, pajak penghasilan, dan dasar serta praktek bantuan Australia kepada Indonesia. Prof. Dr. Emil Salim memaparkan jurusan perkembangan Indonesia, ruang-lingkup dan peranan modal asing, dan memberikan garis besar pengharapan pemerintah Indonesia dari penanaman modal asing. Ia mengatakan bahwa Indonesia lebih menyukai joint venture karena memungkinkan pemindahan skill managerial know-how kepada pengusaha Indonesia.

Senior Australian Trade Commissioner pada Kedutaan Besar Australia di Jakarta, T.N. Cronin, menyatakan bahwa iklim perdagangan antara Australia dengan Indonesia belum pernah sebaik sekarang. J.D. Anthony, Deputy Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan & Industri Australia mengemukakan fakta tentang adanya 48 perusahaan Australia yang bekerja di Indonesia sampai saat ini. Dari 48 perusahaan ini, 21 adalah pabrik, dan 20 diantara pabrik ini merupakan joint enterprise.

# Perusahaan<sup>2</sup> Jepang cari Joint Ventures

## Catatan Redaksi :

Dibawah ini kami cantumkan lanjutan daftar perusahaan<sup>2</sup> Jepang mencari hubungan kerja sama teknis dan/atau joint venture.

Keterangan : J.V. = Joint Venture

T.C. = Technical Cooperation

Para peminat dapat mencari keterangan lebih lanjut kepada :

**ECONOMIC COOPERATION CENTRE  
THE JAPAN CHAMBER OF COMMERCE &  
INDUSTRY**

Room 505, World Trade Centre Building  
4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku  
T o k y o

NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	PRODUK	KETERANGAN
<b>MACHINERY (ELECTRIC APPARATUS &amp; APPLIANCES)</b>			
Harada Industry Co., Ltd.	Tokyo	Car Antenna, Antenna for T.V., Radio Auto Parts.	JV,TC
Kamaya Electric Co., Ltd.	Tokyo	Fixed Composition Resistor	JV,TC
Katsumata Electric Works Co. Ltd.	Tokyo	Switchgear, Motor Control Panel, Distribution Panel Board, Supervisory Panel Board.	TC
Kodama Chemical Industry Co., Ltd.	Tokyo	Electric Sound Goods (Cassette Player, Recorder)	JV,TC
Kokuyo Electric Co., Ltd.	Tokyo	Electronics Test Instruments	JV,TC
<b>MACHINERY (TRANSPORT MACHINERY &amp; EQUIPMENTS)</b>			
ANA Aircraft Maintenance Co., Ltd.	Toyonaka	Aircraft Maintenance and Re- pair, Component Repair	
Bridgestone Cycle Industry Co., Ltd.	Tokyo	Complete Bicycles	JV
Fuji Diesel Co., Ltd.	Tokyo	Land & Marine Diesel Engine (Low, Medium & High Speed)	TC
Kanazawa Cart-Industrial Co., Ltd.	Tokyo	Wheel & Brake for Motor Car, Transport Equipment & Machine- ry.	
Kawasaki Bussan Kaisha Ltd.	Kobe	Ship Building	TC
<b>MACHINERY (OTHER MACHINERIES)</b>			
Chiyoda Seiki Co., Ltd.	Kobe	Gas Welding, Cutting & Regula- ting Equipment	JV
Dainichi Kinzoku Kogyo Co., Ltd.	Amagasaki	Machine Tools (Lathe, Shaper)	JV
Fuji-Car Mfg. Co.,	Tokyo	Steel Plate Bending Roll for Shipyard, Plate Bending Roll, Forging Press.	JV,TC
Fuji Kakoki Factory, Ltd.	Tokyo	Electric Furnace, Electric-Drying Oven etc.	JV
Ishima Manufacturing Co., Ltd.	Osaka	Ship Building, Automotive, Electric, Equipment, Mechanical, Chemical, Transmission	TC

Japan Ceramic Engineering Co., Ltd.	Tokyo	Consulting and Engineering — Services for Ceramic Plants in Overseas Country, Export Services of Ceramic Plant Machinery and Equipment, Ceramic Plants, Refractory Brick, Table Ware, Tile — Ware, Sanitary Ware, Lime, Dolomite and Magnesite Mfg. Plant	JV,TC
-------------------------------------	-------	---	-------

#### METAL, NON-METALS AND THEIR PRODUCTS

Kyowa Co., Ltd.	Tokyo	Zinc-Diecasting, Plastic-Molding and Plating	JV,TC
Kumahira Safe Co., Inc.	Hiroshima	Vault Door, Safe Deposit Boxes	JV,TC
Masahisa Blade Mfg. Co., Ltd.	Tokyo	Cutlery for Paper and Pulp Industry	TC
Nihon Obitetsu Co., Ltd.	Tokyo	Cold Rolled Steel Strip	JV,TC

#### CHEMICALS

Arakawa Forest Chemical Industries, Ltd.	Tokyo	Chemicals for Paper and Associated Industries, Synthetic Resins for Protective Coating, Chemicals for Rubber, Textiles, Adhesives & Building Materials	JV,TC
Cemedine Co., Ltd.	Tokyo	Adhesives	JV,TC
The Columbus Co., Ltd.	Tokyo	Shoe Polishes	JV,TC
Dahlia Cosmetic Co., Ltd.	Nagoya	Hairdressing Preparations and Cosmetics	TC
Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd.	Kyoto	Textile Auxiliaries (Surface Active Agent), Sucrose Fatty Acid Ester, Carboxymethyl Cellulose	JV,TC

#### PULP AND PAPER GOODS

Asahi Shigyo Co., Ltd.	Tokyo	Corrugated Box	JV
Azumi Filter Paper Co., Ltd.	Osaka	Qualitative, Quantitative Analysis Filter Paper	JV,TC
General Co., Ltd.	Tokyo	Carbon Paper, Chemi Sheet-Carbonless Paper, Typewriter Ribbon	TC
Jyoni Business Forms Co., Ltd.	Tokyo	Business Forms for Computers	TC
Nagoya Pulp Co., Ltd.	Nagoya	Pulp and Paper	JV

#### SUNDRY GOODS

S. Aoki & Co.	Osaka	Slider for Zipper	TC
Hashimoto & Co., Ltd.	Osaka	Beaded Handbags, Pearl Handbags & Embroidery Products	JV,TC
Idari Home's Co., Ltd.	Nagoya	Household Articles	JV,TC
Koei Kogyo Co., Ltd.	Tokyo	Cigarette Gas Lighter	JV
Modern Furniture Sales Co., Ltd.	Tokyo	Furniture & Textile	TC

## Perdagangan INDONESIA AUSTRALIA

Bagian Publikasi KADIN Jabar dalam wawancara dengan Mr. Alexander Olah, Assistant Trade Commissioner Kedutaan Besar Australia, memperoleh keterangan bahwa Indonesia sekarang menduduki tempat ke-duabelas dalam urutan pasaran ekspor Australia.

Ekspor ke Indonesia pada tahun 1972 meliputi A \$ 23,9 juta, yang terutama terdiri dari barang-barang jadi. Akan tetapi dalam jumlah ini sudah termasuk sumbangan (grants) berupa gandum seharga A \$ 5,4 juta dan perlengkapan komunikasi seharga A \$ 1 juta.

Neraca perdagangan antara kedua negara pada saat ini menguntungkan Australia, dalam pengertian bahwa ekspor Australia ke Indonesia lebih besar dari pada impornya dari negara kita. Hal ini disebabkan oleh dibatasinya impor minyak

bumi serta produk yang berasal darinya sejak tahun 1967, berhubung dengan ditemukannya sumber-sumber minyak bumi di Australia, yang sifat serta mutunya serupa dengan minyak Indonesia.

Sebelumnya, bahan ini merupakan barang impor Australia yang terutama dari Indonesia yang menyebabkan sebelum tahun 1969 neraca perdagangan menunjukkan keuntungan di pihak kita. Impor Australia dari Indonesia pada tahun 1969 adalah sebesar A \$ 59,9 juta, dan dari jumlah ini minyak merupakan bagian terbesar, yakni sejumlah A \$ 55,6 juta. Periode 1971/1972 impor Australia dari Indonesia merosot sampai A \$ 14,3 juta. Bagian terbesar berupa teh, sebesar A \$ 7 juta.

Secara terperinci data mengenai hal diatas dapat dibaca dalam tabel dibawah ini :



Tukar-pikiran sewaktu kunjungan Australian Electronic and Telecommunications Trade Mission kepada KADIN Jabar, tanggal 18 September 1972. Dari kiri ke kanan: R.I. Poerwito, Office Manager KADIN Jabar, Srihono, Ketua Umum KADIN Jabar, G.S. Schulze, Mission Manager dan pejabat Kementerian Perdagangan & Industri, dan paling kanan, Dr. Iskandar Alisyahbana, Kepala Bagian Elektro ITB sedang berdiskusi dengan salah seorang anggota misi. (Foto: Australian Trade Commission)

**AUSTRALIAN TRADE WITH INDONESIA**

1967/68 — 1971/72

**EXPORTS TO INDONESIA**

	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72*
	\$A'000	\$A'000	\$A'000	\$A'000	\$A'000
Flour, plain, white	4,470	4,051	4,766	3,964	645
Wheat	—	—	—	—	5,412
Communication equipment	1,745	11	263	128	1,052
Vehicles and parts	1,518	2,852	3,049	7,034	5,077
Machinery (except elec.)	734	1,659	2,110	4,068	4,354
Plastic materials	241	51	35	61	198
Processed foodstuffs of vegetable origin (other than fruits, grains and sugar)	116	91	320	572	287
Milk, preserved, dried, etc.	377	530	979	1,271	1,760
Sugar	380	23	4	8	9
Canned Meats	252	21	105	21	49
Chemicals	426	663	1,341	2,540	3,669
Building boards	156	199	348	473	386
Iron and steel	232	831	3,952	2,380	2,577
Mining products (unprocessed)	18	126	85	257	108
Other metal and metal manufactures	292	400	906	1,797	918
Prefabricated buildings, large scale projects, etc.	65	239	520	716	2,851
Commonwealth Government exports	535	170	1,735	547	2,762
Goods exported with intention they be re-imported	1,060	1,668	959	1,698	2,142
Ships, boats and other floating structures	1	697	6,731	469	9,779
Rice, milled	1	—	2,127	7	4
Petroleum and products	31	64	78	625	798
Pigments, paints and varnishes	22	70	407	423	331
Electrical machinery other than communication equipments	72	78	373	1,032	1,210
Zinc, unwrought	—	24	238	1,461	2,552
Butter (incl. butter oil)	64	117	496	783	1,028
Oils, fats, waxes (less Petroleum)	33	28	35	52	144
Earthenware, cement, china, glass, stoneware	70	11	24	266	643
Optical, surgical and scientific instruments, and photographic goods	13	153	331	440	654
Timbers	11	4	34	153	2
Live animals	—	12	43	166	169
Textiles	24	38	47	147	157
Wool (greasy)	8	5	143	319	34
Other	958	1,720	2,605	4,630	5,489
<b>TOTAL</b>	<b>13,870</b>	<b>20,665</b>	<b>35,266</b>	<b>39,076</b>	<b>57,250</b>

**IMPORTS FROM INDONESIA**

Coffee, raw or kiln dried	303	391	625	421	535
Tea	2,394	3,402	3,906	5,413	7,502
Petroleum and Petroleum products	52,392	55,652	43,737	15,649	4,400
Mineral tar and crude chemicals from coal, petroleum, etc.	56	36	—	—	—
Sisal fibres	13	101	36	38	—
Outside packages (special transac- tions)	99	122	178	193	258
Wood timber and cork	14	61	156	434	624
Other	159	191	244	375	993
<b>TOTAL</b>	<b>55,430</b>	<b>59,956</b>	<b>48,882</b>	<b>22,523</b>	<b>14,312</b>

\* preliminary

THE FIRST IN MODERN WATER TREATMENT



- **PURAFIL WATER FILTERS** and
- **WATER SOFTENERS**

**Made in Australia**

for industrial and domestic application

inquiries :

sole representative for Indonesia

**TANDJUNG TRADING COMPANY**

Jl. Buahbatu 34 — 50386

Bandung.

Pemerintah Jerman Barat telah meningkatkan kebijaksanaan yang hingga saat ini masih terbatas, dalam mengasuransikan kredit ekspor ke Indonesia dengan jaminan (Bundesgarantie) atas ekspor perusahaan swasta dan dengan ikatan/borg (Bundesbürgschaften) atas ekspor instansi pemerintah. Menurut kebijaksanaan tersebut mulai saat ini volume transaksi sampai 2,5 juta D-Mark dan dalam jangka waktu hingga 5 tahun diasuransikan dengan cara tersebut.

Dalam pembicaraan dengan Maskapai Asuransi Kredit "Hermes Kreditversicherung AG.", di Hamburg maupun instansi pemerintah di Bonn, J. Willecke, General Manager Perkumpulan EKONID telah mengutarakan situasi dunia business di Indonesia, terutama sekali mengenai tidak diizinkan jaminan bank secara prinsipil atas kredit2 valuta asing oleh Bank Indonesia.

Oleh pihak Hermes diterangkan, bahwa yang menentukan justru bonafiditas langganan. Apalagi di Indonesia tidak mungkin untuk mendapatkan bank garansi, masih ada kebijaksanaan lain, yakni keharusan menyampaikan informasi yang dapat dipercaya kepada Panitia Antar Kementerian (IRA = Interministerieller Referentenausschuß) yang berwenang dalam masalah ini pada waktu diadakan penelitian terhadap kegiatan perdagangan tersebut. (EKONID)

Lanjutan dari hal. 31.

lam pelaksanaan program kebijaksanaan ekonomi darurat pemerintahan Nixon malahan menempuh arah yang berlawanan. Jadi, kedua "kekuatan dagang" utama Barat ini mengambil sikap berbeda terhadap suatu persoalan penting, hal mana merupakan pencerminan dari tingkat ketidak tergantungan yang telah dicapai Eropa Barat melalui integrasi. Karena juga Uni Sovjet tidak mengarungi jalan yang sama seperti MEE, melainkan berusaha memperkuat pengaruhnya di dalam Dunia Ketiga dengan jalan mengadakan ikatan-ikatan bilateral, maka diberikannya preferensi dalam rangka UNCTAD bisa merupakan suatu langkah yang dapat membawa Eropa Barat kembali ke dalam percaturan politik dunia, terlebih dahulu paling sedikit secara ekonomis.

Akan tetapi keberhasilannya baru nyata, bila telah dicapai persesuaian paham dengan Amerika Serikat, dan bila integrasi ekonomis ditopang oleh integrasi politis.

\* PENGALAMAN SEJAK 1918  
DALAM MENERJAKAN

## DAGING HAM DAN SOSIS

\* MENJAMIN KEPUASAN  
ANDA.

\* HANYA YANG

## TERBAIK TERPILIH DAN BERSIH

\* DENGAN HARGA YANG  
PANTAS ANDA DAPATKAN  
DI

**Perusahaan Daging  
BADRANAJA**

Jl. Lengkong Besar 1A Bandung  
Tel. 4643.



Diskusi tentang "Suka-duka hubungan Indonesia — Belanda" tanggal 19 April 1972, dengan Delegasi Dagang Belanda. No. 1 dari kanan Dr. A.M. Kadarman, sedangkan No. 2 dari kanan Drs. ec. Kaptin Adisumarta, anggota Dewan Kurator LPPM.

(Foto : Humas LPPM)

#### SISTIM KURSUS-KURSUS

1. **Kursus general management**, dibagi dalam jenis :

1.1. **Pengantar**, dimana peserta dibiasakan dengan pengertian, prinsip-prinsip dan teori-teori. Bahan teoretis ini didemonstrasikan dan diterapkan dengan cases dan latihan-latihan sederhana. Kursus-kursus ini dimaksudkan untuk "promising young employees" yang akan diarahkan kepada managerial responsibility.

1.2. **Integrated exercise**, yang terdiri dari business games atau cases yang menyeluruh. Peserta-peserta ikut serta secara aktif dari awal sampai akhir. Instruktur membimbing dan memberikan "supporting instructions". Kursus-kursus ini dimaksudkan untuk general manager atau manager bidang fungsional yang ingin menyiapkan dirinya menjadi general manager.

1.3. **Special exercises**, yang bermaksud menambah pengetahuan atau ketrampilan tertentu, seperti electronic data processing atau metodik problem solving. Kursus-kursus ini dimaksudkan untuk general maupun functional manager.

2. **Functional Management Courses/Workshop**  
Kursus-kursus dibagi menurut bidang fungsional (finance, production, marketing, personnel) dan juga menurut tarafnya.

2.1. **Appreciation Courses** dalam keempat bidang fungsional; kursus-kursus ini dimaksudkan untuk general manager yang dalam kebijaksanaan umum memerlukan pengertian cukup banyak mengenai bidang fungsional, maupun untuk manager yang memerlukan pengertian tentang bidang fungsional lainnya atau yang ingin menyiapkan dirinya menjadi general manager.

2.2. **Advanced Courses** yang diselenggarakan untuk functional manager dalam bidang mereka masing-masing untuk dapat me-

ngikuti perkembangan-perkembangan mutakhir dan menambah ketrampilan.

2.3. **Specialized Courses**, dalam bidang fungsional masing-masing yang memusatkan pada satu topik saja.

3. **Supporting Courses**

Bukan dimaksudkan untuk manager, melainkan untuk staf ahli yang melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh manager. Misalnya : kursus works study, pembukuan, salesmen, market-research, business English.

4. **Kursus lengkap**

Dalam bidang general maupun functional management dalam suatu package course yang akan memakan waktu lebih kurang 700 jam, dan dapat ditempuh bertahap atau sekaligus dalam jangka waktu enam bulan. Maksud kursus lengkap ini ialah menyiapkan tenaga-tenaga yang sudah mempunyai suatu subordinate managerial position untuk menjadi manager dalam suatu bidang fungsional, dan mempunyai dasar dan minat cukup besar untuk pada suatu saat dapat diangkat menjadi general manager.

5. **In-company training.**

LPPM juga menyelenggarakan kursus-kursus in-company training untuk perusahaan tertentu. Training tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan langganan dan biasanya staf LPPM mengadakan suatu survey training needs sebelum merencanakan curriculum dan bahan yang disetujui langganan.

Training semacam ini dapat bersifat lebih umum, seperti misalnya latihan-latihan untuk mengintroduksir sistim "management by objectives", atau untuk melatih supervisors, atau lebih khusus dalam suatu bidang fungsional atau dalam bidang behavioral sciences kalau misalnya diadakan latihan-latihan untuk mengembangkan saling pengertian diantara manager asing dengan manager Indonesia. In-company training telah diselenggarakan antara lain untuk UNILEVER dan FAROKA.

Lanjutan hal 8.

Peraturan ini juga menguraikan dengan lebih terperinci ketentuan-ketentuan kelonggaran perpajakan, transfer keuntungan dan dividen, serta repatriasi modal.

Suatu segi lain lagi yang sangat penting bagi Indonesia, adalah anjuran untuk mengikutsertakan modal domestik dalam usaha-usaha baru yang dijalankan dengan modal asing.

Misalnya, bila suatu usaha yang mulanya dijalankan sepenuhnya dengan modal asing kemudian pada tahap lebih lanjut menawarkan sahamnya kepada peserta-peserta Indonesia, hasil penjualan bisa dipindahkan kembali kepada valuta aslinya, seperti hasil penjualan serta dana lain yang boleh ditransferkan berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang PMA. Usaha memberikan kesempatan bagi modal domestik telah menghasilkan kebijaksanaan untuk tidak memberikan pembebasan pajak penuh terhadap investasi yang besarnya kurang dari \$ 2,5 juta, kecuali bila dibuka kesempatan bagi turut sertanya modal domestik dalam usaha tersebut. Aplikasi penanaman modal yang mengikutsertakan modal Indonesia memperoleh prioritas, dan keuntungan-keuntungan lain dalam hal semacam ini mungkin akan diciptakan pada masa-masa yang akan datang.

Indonesia adalah pendaatang baru dikalangan negara-negara berkembang, yang berkecimpung dalam soal modal asing. Kita masih berada dalam taraf peralihan, dan masih menjalani proses perolehan pengalaman yang diperlukan sebagai pedoman dalam pengolahan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengannya. Bagian tata hukum kita yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun barsumber kepada luar negeri, masih berada dalam proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian terhadap tujuan perkembangan bukan saja bersifat teoretis, akan tetapi juga berevolusi sebagai tanggapan terhadap persoalan-persoalan serta pengalaman-pengalaman baru. Kita juga harus senantiasa menilik perundang-undangan lain yang berpengaruh terhadap iklim usaha serta penanaman modal pada umumnya. Dengan bantuan teknis dari I.M.F. (International Monetary Fund) kita sedang mengolah perbaikan perundang-undangan perpajakan kita. Disamping itu, perundang-undangan

yang menyangkut pertanian dan perburuhan harus lebih didekatkan kepada tujuan pembangunan.

#### **PENANAMAN MODAL ASING DAN IKLIM POLITIK**

Stabilitas serta kelangsungan suatu iklim politik yang menguntungkan bagi penanaman modal asing akan sangat tergantung kepada kesediaan dan kemampuan usaha-usaha asing untuk mengembangkan hubungan-hubungan dengan lingkungan dimana mereka bergerak, dengan masyarakat pengusahanya, dengan universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan demikian pula dengan masyarakat intelektual pada umumnya. Dengan melibatkan usaha setempat di dalam jaringan kegiatannya, melalui bantuan teknis, penggunaan bahan baku setempat, rangsangan bagi usaha pemberian jasa dan pemeliharaan; dan pembuatan komponen-komponen yang bisa dihasilkan setempat, diperkenalkannya anggota-anggota staf bergerak dalam pendidikan supaya pemindahan teknologi, kemampuan organisasi serta management pada semua tingkat bisa dipercepat, serta menaruh perhatian terhadap perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah setempat di dalam wilayah kerjanya, perusahaan-perusahaan asing bisa menjadi faktor penggerak yang mempercepat perkembangan masyarakat di mana mereka bekerja.

Oleh karena itu tidak boleh diremehkan sumbangan positif yang dapat diberikan usaha asing, bukan saja kepada perkembangan ekonomi, akan tetapi juga kepada pertumbuhan politik yang sehat, tanpa mengambil suatu peranan politis. Pada hemat saya, usaha swasta asing bisa memainkan peranan ini dengan tidak membahayakan peran utamanya sebagai suatu organisasi pencari laba. Dengan cara ini, usaha swasta asing akan menghindari bahaya menjadi suatu *enclave* asing di dalam suatu lingkungan yang semakin bersifat bermusuhan. Perlindungan terbaik bagi dirinya adalah integrasi dengan pola perkembangan nasional di tempat ia bergerak.

Bila suatu usaha penanaman modal asing akhirnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai kurang peka terhadap cita-cita bangsa, sebagai penghalang perkembangan nasional, atau sebagai unsur asing yang mengejar tujuan yang bertolak belakang terhadap kepen-

tingan nasional, tekanan-tekanan politis terhadap perisai-perisai hukumnya pasti akan terbentuk. Mutlak perlu suatu usaha swasta asing yang beroperasi di dalam sebuah negara berkembang harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dirinya dengan tujuan pembangunan negara yang bersangkutan, dan membentuk kerjasama dengan usaha nasional sehingga dianggap sebagai sekutu, sebagai faktor penggerak perkembangan yang kehadirannya adalah dalam kepentingan nasional.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap penanaman modal asing terletak pada tumbuhnya suatu kelas menengah pengusaha dan entrepreneur setempat, dan berkembangnya kebersamaan kepentingan usaha antara mereka dengan usaha-usaha asing di negara mereka. Setiap sumbangan yang dapat diberikan oleh usaha swasta asing demi tujuan itu memberikan tambahan jaminan jangka panjang bagi modal yang ditanamkan.

#### **PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENTAS INTERNASIONAL**

Jaminan terhadap penanaman modal asing di dalam negara-negara berkembang tak dapat dielakkan harus dipertimbangkan juga dalam suatu gelanggang yang lebih luas, pada saat yang bersamaan. Faktor-faktor penentuan di sini adalah ledakan penduduk, masalah kemelaratan internasional, dan perlunya pola umum perkembangan ekonomi di seluruh dunia.

Sudah umum dipahami bahwa seluruh dunia semakin saling tergantung satu dengan lain. Sedikit sekali keputusan-keputusan politis atau ekonomis yang diambil dalam konteks nasional, yang tidak akan menimbulkan riak di dalam gelanggang internasional, dan demikian juga sebaliknya. Dunia juga semakin mengecil dan makin lama makin sesak. Dalam waktu tiga puluh tahun penduduk dunia diperkirakan akan bertambah dua kali lipat. Ketidak seragaman kepadatan penduduk pelbagai bagian dunia disamping kepincangan dalam pembagian kekayaan, akan mengakibatkan pergeseran-pergeseran penting dalam perimbangan kekuatan, dan demikian pula ketegangan-ketegangan yang memuncak di dunia dalam dasawarsa-dasawarsa yang akan datang. Akan tetapi pertama-tama, umat manusia harus menemukan jawaban atas masalah pokok bagaimana menjediakan pangan bagi

penduduk, bagaimana mencukupi produksi sandang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan materiil utama lainnya di seantero dunia, kalau kehidupan beradab ingin dipertahankan. Pertambahan penduduk yang pesat, terutama di dalam negara-negara miskin, oleh karena itu harus ditanggapi dengan peningkatan kemampuan produksi ekonomi, dan lebih-lebih lagi dengan taraf keterlibatan yang lebih tinggi lagi dari negara-negara miskin itu sendiri dalam proses-proses tadi.

Kalau kita, umat manusia secara keseluruhan, gagal menggerakkan diri kita sendiri guna pencapaian tujuan ini, ketegangan-ketegangan yang tak dapat dielakkan lagi tumbuhnya dinegara-negara miskin, akan menghancurkan kemungkinan untuk berkembang menjadi masyarakat-masyarakat yang semakin terbuka, yang sanggup berhubungan secara rasional dan kreatif dengan dunia luar. Bila ini terjadi, tata internasional, termasuk keamanan negara-negara kaya akan berada dalam bahaya. Kemampuan kita untuk menggerakkan diri menghadapi tugas ini akan sangat menentukan corak serta mutu kehidupan yang kita jalani menjelang waktu kita beranjak ke dalam abad kedua puluh satu, sekiranya masa itu akan pernah kita capai. Hal ini menuntut suatu perombakan besar dalam penjurusan sumber-sumber kekayaan dunia dan penciptaan suatu perimbangan baru secara global antara pengeluaran untuk persenjataan waan dan untuk memerangi kemelaratan domestik dan internasional. Untuk ini diperlukan peneguhan kembali itikad politik yang akan menghasilkan reorganisasi prioritas-prioritas global dan penjurusan baru dalam pembagian sumber-sumber kekayaan dunia.

Dalam hubungan ini, pencarian yang sekarang sedang berlangsung di seluruh dunia untuk menemukan bentuk-bentuk dan cara-cara yang paling menguntungkan guna peningkatan perpindahan modal, ketrampilan, serta kemampuan mengelola dari negara-negara yang sudah berkembang kepada negara-negara baru, sangat menentukan adanya. Pengalaman selama Dasawarsa Pembangunan pertama Persekitaran Bangsa Bangsa telah menunjukkan bahwa bila tiada aliran modal yang lebih besar di seluruh dunia, terutama modal swasta kenegara-negara berkembang, sangat kecil harapan untuk mendapatkan pemecahan yang memadai bagi masalah ini. Hanya dapat diharapkan bahwa usaha swasta di segenap penjuru dunia akan

dapat mengembangkan kemampuan, kecakapan — melampaui pertimbangan jangka dekat untuk memperoleh laba — guna menciptakan corak-corak serta kerangka pemikiran yang akan memungkinkan dan menguntungkan perluasan peranan ini. Sebab, bagaimanapun juga, perusahaan-perusahaan merupakan wadah yang wajar bagi teknologi, ketrampilan, serta kemampuan organisasi dan mengelola, untuk tugas ini.

Juga benar bahwa peningkatan penerapan modal swasta untuk membangkitkan suatu perkembangan internasional, pada dirinya tidak akan memadai. Jika aliran dana-dana perkembangan dari pemerintah ke pemerintah dalam bentuk bantuan asing tidak dilangsungkan pada tingkat yang memadai untuk beberapa waktu, tidak ada prospek bahwa perkembangan prasarana-prasarana di dalam sejumlah negara baru akan cukup jauh untuk memungkinkan modal swasta memainkan peranannya yang produktif dan menguntungkan masyarakat. Kemampuan konseptual dan operasional kita juga sangat menentukan dalam gerak ke arah ini. Kita perlu mengembangkan suatu sistem hak dan kewajiban, insentif, jaminan dan pengamanan berbagai jenis, yang lebih memadai dan lebih konsisten, baik di pihak negara-negara yang sudah maju maupun di pihak negara-negara yang sedang berkembang.

Kita harus memberi bentuk-bentuk dan cara-cara yang lebih memadai untuk memudahkan perpindahan modal dan sumber-sumber lain. Ruang lingkup dan kemampuan badan-badan perkembangan multilateral yang ada dewasa ini, seperti Bank Dunia dan bank-bank regional harus dikaji kembali dalam rangka ini. Demikian juga halnya dengan terbukanya pasar-pasar modal dan surat berharga internasional bagi negara-negara berkembang dan suatu sistem yang saling berhubungan secara internasional serta terpaut kepada kebutuhan internasional akan perkembangan.

Perhatian harus juga diberikan kepada peranan semakin besar yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam meng-internasional-kan perkembangan. Sifat **extra-nasional** pusat-pusat penentu perusahaan-perusahaan ini menampilkan masalah-masalah penting, dan menurut Philip de Seynes, Wakil Sekretaris Jendral PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, menuntut pembentukan suatu sistem baru hukum internasional dengan bobot ekonomi yang lebih besar.

Motif mencari laba semata-mata tidak mungkin menghasilkan peranan yang lebih besar oleh modal swasta sehingga memadai guna menghadapi ledakan penduduk dan masalah kemelaratan yang bisa mencabik dunia ini. Yang mungkin diperlukan juga adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang besarnya dan mendesaknya masalah-masalah yang harus dijumpai oleh umat manusia duapuluh sampai tigapuluh tahun lagi, serta suatu gambaran yang lebih jelas dari macam dunia yang ingin kita huni.

Pada hemat saya, sangat penting bagi kita semua dalam membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan penanaman modal asing di negara-negara sedang berkembang serta perisai-perisai hukum untuk melindunginya, bahwa kita melakukannya dengan penuh kesadaran akan besarnya dan mendesaknya peranan yang harus dimainkan oleh modal swasta; dan pentingnya modal swasta serta pemerintah-pemerintah negara-negara berkembang maupun yang sudah maju untuk bersama-sama menciptakan kondisi-kondisi untuk memungkinkan ini terjadi, kalau kita ingin memecahkan masalah-masalah yang akan menentukan keseluruhan lingkungan global, dimana kita semua, tidak terkecuali usaha swasta, harus berdiambil dalam masa depan yang tidak terlalu jauh lagi.

## RIWAYAT PENULIS

**SUDJATMOKO** (50 th.) mempunyai latar belakang sebagai penulis esei, penerbit, anggota Konstituante, diplomat, dan adalah tokoh intelektual Indonesia yang berwibawa internasional, yang banyak diminta untuk memberikan ceramah/prasaran dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Dalam tahun ini a.l. telah menghadiri seminar tentang keamanan Asia Tenggara di Seoul, Korea Selatan, dan telah memberikan prasaran dalam konperensi internasional yang diselenggarakan di Montreal, Kanada, oleh "Institute for Strategic Studies" (ISS). Pada saat ini memegang jabatan Penasehat Teknis/Ahli Bidang Sosial Budaya pada BAPPENAS, yang dipegangnya sejak pulang dari Amerika Serikat, setelah mengakhiri masa jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Washington.

Dari perguruan-perguruan tinggi Amerika Serikat ia telah dianugerahi gelar Doctor honoris causa sebanyak dua kali hingga kini, yaitu masing-masing Doctor of Law dari Cedar Crest University, dan Doctor in Humanities dari Yale University.

**R.E.A. MAMOER** (58 th.), memperoleh gelar Doctorandus dari Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, setelah sebelumnya menempuh pendidikan H.I.S., MULO — B dan H.I.K. Pada saat ini memegang jabatan Managing Director KADIN Jawa Barat, di samping duduk dalam kepengurusan sebagai Ketua IV. Antara tahun 1951 — 1967 menjadi pengusaha swasta, dan antara tahun 1960 — 1966 anggota DPRD Jawa Barat. Selain jabatan di KADIN juga mengajar sebagai dosen pada Universitas Pajajaran dengan pangkat Lektor Kepala. Pada tahun 1954 melawat ke Eropa Barat dalam rangka menjalankan perusahaan, tahun 1956 mengikuti Congress International Chamber of Commerce di Jepang, kemudian pada tahun 1970 kembali berkunjung ke Eropa Barat untuk mengikuti Seminar tentang Development Aid, dan menjalani training Chamber of Commerce & Industry.

**B. N. MARBUN** (36 th.), menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara sampai mendapat gelar Sarjana Hukum. Antara tahun 1963 — 1967 belajar Hukum Internasional di Muenster/Westfalen dan Heidelberg, Jerman Barat, 1967 — 1968 masalah integrasi Eropa di Amsterdam, dan pada tahun 1966 mengikuti kursus Hukum Internasional di London.

Tahun 1969 — 1970 menulis pada pelbagai harian dan majalah di Jakarta, kemudian sejak tahun 1971 sampai sekarang bekerja sebagai staf Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Management (LPPM) di Jakarta, dengan jabatan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Dalam bulan Mei — Juni 1972 ditugaskan oleh LPPM untuk mengikuti "Problem-solving and decision-making course" di Singapore, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari Amerika Serikat, Keppner-Tregoe and Associates, yang berpusat di Princeton, New Jersey.

**DEDDI ANGGADIREDJA** (30 th.), sampai sekarang masih menempuh pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran. Sejak tahun 1966 diangkat menjadi Assisten Madya pada fakultas tersebut. Antara tahun 1968 — 1970 menulis untuk harian-harian serta majalah-majalah di Bandung dan Jakarta.

Tahun 1971 sampai sekarang menjadi program officer KADIN Jabar dalam kerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung, dengan tugas menyelenggarakan survey-survey, seminar-seminar dan upgrading courses untuk para pengusaha Jawa Barat.

Terakhir ditugaskan oleh Friedrich Naumann Stiftung untuk menjadi supervisor dalam research Pattern of Trade dan Profit Margin, yang diselenggarakan di Jawa Timur oleh Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, atas kerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung dan KADIN Jawa Timur.

## **Segera Terbit :**

Buku-buku laporan Lokakarya yang diselenggarakan oleh KADIN JABAR :

1. Kepariwisataaan Jawa Barat

Harga : Rp. 400,—

2. Food-processing

Harga Rp. 400,—

Dicetak di atas kertas HVS 80 gr. dan kunsdruk

## **Masih Tersedia :**

Buku-buku hasil seminar :

1. Penanaman Modal Asing

Harga Rp. 400,—

2. Pembangunan Daerah Cirebon

Harga : Rp. 500,—

Dicetak di atas kertas kunsdruk.

Ongkos kirim per eks. : Rp. 35,—

Pesanan dialamatkan kepada Sekretariat KADIN JABAR

Jl. Suniaraja Timur 1 A — Bandung